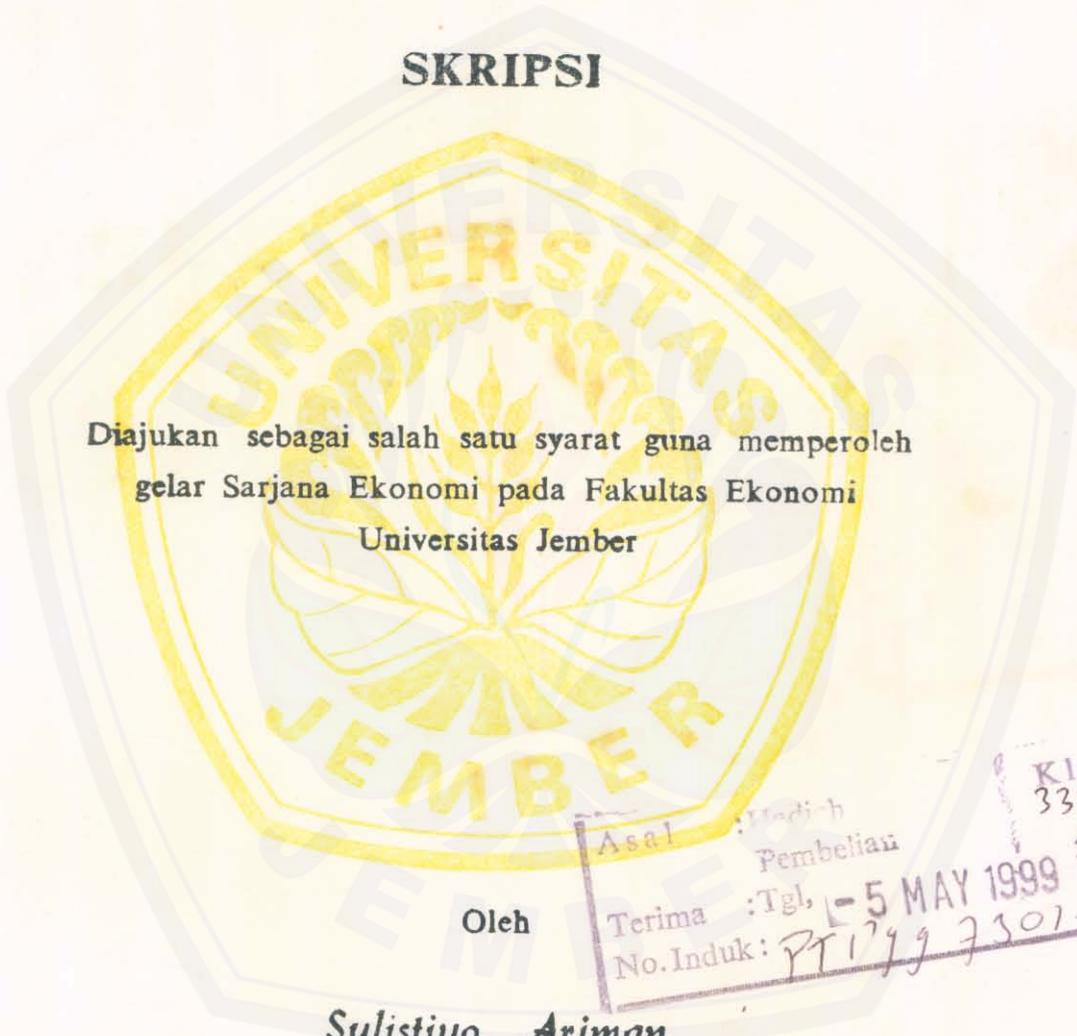




**ANALISIS PENGARUH DANA YANG DIHIMPUN, SUKU BUNGA SBI DAN SUKU BUNGA SBPU TERHADAP PENYALURAN KREDIT BANK UMUM MILIK NEGARA TAHUN 1990. I-1997. IV**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember



Oleh

**Sulistiyo Ariman**

**NIM : 9308101063/SP**

Asal : Medich  
Pembelian  
Terima : Tgl. - 5 MAY 1999  
No. Induk : PT 199 7301. 186  
Klass 332.7  
AR1  
S

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
1999**

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DANA YANG DIHIMPUN, SUKU BUNGA SBI DAN SUKU BUNGA  
SBPU TERHADAP PENYALURAN KREDIT BANK UMUM MILIK NEGARA  
TAHUN 1990.I - 1997.IV

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : SULISTIYO ARIMAN

N. I. M. : 9308101063

J u r u s a n : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

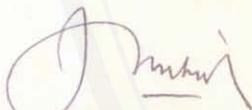
telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

12 Maret 1999

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

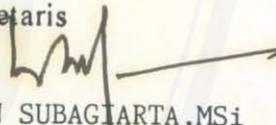
### Susunan Panitia Penguji

Ketua,



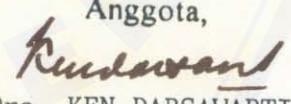
Dra. ANDJAR WIDJAJANTI  
NIP. 130 605 110

Sekretaris



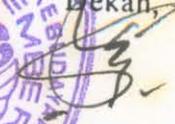
Drs. I WAYAN SUBAGIARTA, MSi  
NIP. 131 660 783

Anggota,



Dra. KEN DARSAWARTI  
NIP. 130 531 975

Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan



Drs. H. SUKUSNI, M.Sc  
NIP. 130 350 764

**JUDUL SKRIPSI**

ANALISIS PENGARUH DANA YANG DIHIMPUN, SUKU BUNGA SBI DAN SUKU  
BUNGA SBPU TERHADAP PENYALURAN KREDIT  
BANK UMUM MILIK NEGARA

TAHUN 1990.I – 1997.IV

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SULISTIYO ARIMAN  
N.I.M : 9308101063  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

12 MARET 1999

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris

Drs. I Wayan Subagiarta, M.Si  
NIP. 131 660 783

Dra. Andjar Widjajanti  
NIP. 130 605 110

Anggota,

Dra. Ken Darsawarti  
NIP. 130 531 975

Mengetahi / Menyetujui  
Universitas jember  
Fakultas ekonomi  
Dekan,

Drs. H. Sukusni, M.Sc  
NIP. 130 350 764



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SARJANA EKONOMI

Nama : SULISTIYO ARIMAN  
N I M : • 9308101063  
Tingkat : SARJANA  
Jurusan : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
Mata Kuliah yang Menjadi  
Dasar Penyusunan Skripsi : EKONOMI MONETER  
Dosen Pembimbing : I. Dra. KEN DARSAWARTI  
II. Dra. NANIK ISTIYANI, Msi

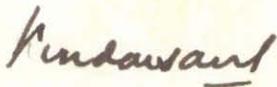
Disahkan di : Jember

Pada tanggal :

DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH

Mengetahui

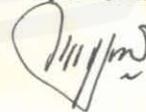
Pembimbing I



Dra Ken Darsawarti

NIP. 130 531 975

Pembimbing II



Dra. Nanik Istiyani, Msi

NIP. 131 658 376

**MOTTO :**

“Hanya Allah yang penting, dunia tidak, aku apalagi.....Dalam hidup ini, ada sesuatu yang tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan, serta yang tidak seperti yang kita mau.....” (Emha Ainun Nadjib)

“Sesungguhnya di samping kesukaran ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (mengerjakan suatu pekerjaan), maka bersusah payahlah (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhanmu berharaplah.” (Q. S. Al-Insyirah : 6-8)

“Jika kamu bersyukur, maka akan Aku tambah nikmat yang ada padamu, tetapi jika kamu tidak bersyukur, sesungguhnya siksaan-Ku amat pedih.” (Q.S. Ibrahim : 7)



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul *“Analisis Pengaruh Dana yang Dihimpun, Suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I – 1997.IV”* dapat terselesaikan dengan baik.

Sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Ken Darsawarti dan ibu Dra. Nanik Istiyani, MSi selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sukusni, MSc selaku dekan Fakultas Ekonomi beserta seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Dra. Aminah selaku kepala jurusan IESP yang telah memberikan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Gerrit selaku penanggung jawab perpustakaan Bank Indonesia cabang Jember yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan penelitian.
5. Seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan moril

Berbagai usaha demi kesempurnaan penulisan skripsi ini telah kami lakukan, namun kami sadar kekurangan pasti selalu ada, untuk itu saran-saran yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Jember, Maret 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman :
HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
HALAMAN PERSETUJUAN .....	III
HALAMAN MOTTO .....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
DAFTAR ISI .....	VII
DAFTAR TABEL .....	IX
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Hipotesis .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis dan Sumber Data .....	8
1.5.2 Metode dan Analisa Data .....	8
(1) Uji Statistik .....	9
(2) Uji Ekonometri .....	11
1.6 Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM</b>	
2.1 Latar Belakang Berdirinya Bank Umum Milik Negara .....	14
2.2 Jumlah Dana yang Dihimpun pada Bank Umum Milik Negara .....	17

2.3 Jumlah Kredit yang Disalurkan Oleh Bank Umum Milik Negara .....	18
2.4 SBI dan SBPU .....	19
<b>BAB III. LANDASAN TEORI</b>	
3.1 Bank Umum Sebagai Lembaga Perantara Keuangan .....	23
3.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bank .....	24
3.3 Skala Prioritas Penggunaan Dana .....	26
3.4 Pengertian Kredit .....	28
3.5 Pasar Uang dan Tingkat Bunga .....	30
3.6 Operasi Pasar Terbuka sebagai Instrumen Kebijakan Moneter .....	32
<b>BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Analisis Deskriptif.....	35
4.2 Analisis Impresial.....	38
4.2.1 Uji Statistik .....	39
4.2.2 Uji Ekonometri .....	42
4.3 Pembahasan .....	44
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Jember, November 1998

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Dana yang terhimpun oleh Bank Umum Milik Negara meliputi tabungan, giro dan deposito untuk periode tahun 1990.I-1997.IV (dalam miliar Rupiah).....	18
Tabel 2. Perkembangan kredit Bank Umum Milik Negara tahun 1990.I – 1997.IV (dalam miliar Rupiah).....	19
Tabel 3. Hubungan antara jumlah kredit dengan besar dana pada Bank Umum Milik Negara tahun 1990-1997.....	35
Tabel 4. Hubungan antara jumlah kredit dengan tingkat suku bunga SBI besar dana pada Bank Umum Milik Negara tahun 1990-1997.....	36
Tabel 5. Hubungan antara jumlah kredit dengan tingkat suku bunga SBPU besar dana pada Bank Umum Milik Negara tahun 1990-1997.....	37
Tabel 6. Analisa regresi untuk pengujian secara bersama-sama.....	39
Tabel 7. Analisa regresi untuk pengujian secara partial.....	40

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan usaha bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk dari suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985:15).

Pelaksanaan pembangunan memerlukan pembiayaan dana yang besar. Sumber pembiayaan tersebut dapat diusahakan dari dalam maupun dari luar negeri. Perbankan sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendanaan di dalam negeri dengan menjembatani antara masyarakat yang memiliki dana lebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Nomer 7 tahun 1992, bahwa perbankan mempunyai peran penting serta strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dan Trilogi Pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi (Bank Indonesia, 1992:31).

Kebijaksanaan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijaksanaan ekonomi makro. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya instrumen atau alat kebijaksanaan yang dipakai adalah: pertama, instrumen yang umum, meliputi politik Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Politik Cadangan Minimum (Reserve Requirement) dan politik Diskonto (Discount Policy); kedua, instrumen yang



meliputi margin requirement, pembatasan atau penentuan tingkat bunga, yang kesemuanya untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor ekonomi tertentu; dan ketiga, adalah instrumen yang sering disebut dengan moral suasion, di samping itu devaluasi termasuk juga dalam instrumen kebijaksanaan moneter (Nopirin, 1988:56)

Perbankan nasional mengalami perubahan sejak dikeluarkannya kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983 dan 27 Oktober 1988. Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 merupakan paket kebijaksanaan yang berisi antara lain : (1) pelepasan pagu kredit; (2) peningkatan suku bunga perbankan; (3) peningkatan suku bunga Tabanas; (4) untuk sektor yang diprioritaskan tetap berlaku pagu tingkat bunga dan kredit likuiditas Bank Indonesia. Peniadaan pagu kredit akan meningkatkan kemampuan penyaluran kredit-kredit oleh sektor perbankan yang juga mencerminkan kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat (Gunawan, 1991:166). Sedangkan kebijaksanaan moneter tanggal 27 Oktober 1988 atau yang dikenal dengan Pakto '88 dikeluarkan oleh otoritas moneter dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan ada sebelumnya dan meningkatkan pengaliran dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, mendorong berkembangnya pasar uang dan modal.

✓ Deregulasi perbankan tersebut diharapkan dapat menghilangkan distorsi-distorsi dalam perekonomian nasional khususnya sektor perbankan, serta diharapkan dapat mendorong bekerjanya mekanisme pasar secara luas di sektor perbankan dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan bank-bank umum pada kredit likuiditas Bank Indonesia (BI) dan untuk mendorong mobilisasi atau penghimpunan dana masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas bank-bank umum dalam mengalokasikan dan mengelola sumber-sumber yang dimiliki mereka. Iswardono (1993:179) menyebutkan bahwa efisiensi perbankan dapat juga dilihat dari Efektifitas di dalam memotivasi dana dari

masyarakat dan efektifitas dalam menyalurkan dana yang terkumpul bagi kegiatan yang benar-benar produktif.

Rangkaian kebijakan moneter tersebut telah membawa dampak yang nyata pada aktivitas perbankan dalam menghimpun dan meyalurkan dana tersebut pada pihak yang membutuhkan, jumlah dana yang dapat dihimpun melalui masyarakat serta kredit yang disalurkan juga meningkat dengan tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 jumlah dana yang dapat dihimpun sebanyak Rp 6.411 milyar dengan kredit yang disalurkan sebesar Rp 5.321 milyar. Sampai tahun 1983, jumlah dana yang dapat dihimpun sebesar Rp 12.387 milyar dengan kredit yang disalurkan sejumlah Rp 12.956 milyar. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini semakin meningkat menjadi Rp 37.510 milyar dengan total kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp40.709 milyar pada tahun 1988 dan pada tahun 1995 dana yang berhasil dihimpun menjadi Rp 214.746 milyar, sedangkan kreditnya mencapai Rp 188.903 (Bank Indonesia, 1984, 1990, 1996)

Salah satu alat bagi pengendalian moneter adalah dilakukannya politik pasar terbuka, yang merupakan instrumen tidak langsung bank sentral. Politik pasar terbuka meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat oleh bank sentral. Tindakan ini akan berpengaruh pada: pertama, menaikkan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi. Sebab dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menambah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut, yang ada pada bank sentral. Akibat tambahnya cadangan, maka bank umum dapat menambah jumlah uang beredar (melalui proses penciptaan kredit. Kedua, tindakan pembelian/penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga (dan dengan demikian juga tingkat bunga) surat berharga. Akibatnya, tingkat bunga umum juga akan terpengaruh. (Nopirin, 1988:57).

Instrumen dari politik pasar terbuka berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI mulai dikenalkan pada perbankan nasional pada 1 Februari 1984 oleh Bank Indonesia, sedangkan SBPU mulai dikeluarkan pada tahun 1985 oleh bank sentral. Di dalam pelaksanaannya kedua

instrumen yang digunakan ini mempunyai sifat yang satu sama lain berbeda, di mana SBI bersifat kontraktif, artinya untuk mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan SBPU bersifat ekspansif, artinya menambah jumlah uang yang beredar. Walau pada dasarnya kedua instrumen ini sama yaitu sama-sama mempengaruhi jumlah uang beredar. Bila suku bunga dianggap terlalu tinggi, bank sentral dapat membeli SBPU dengan suku bunga relatif rendah untuk menurunkan suku bunga tersebut. Sebaliknya apabila suku bunga dianggap terlalu rendah, diusahakan menjual SBI dengan suku bunga yang relatif tinggi. Dari hal tersebut kebijaksanaan suku bunga dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah deposito sehingga dapat disalurkan melalui investasi dan untuk penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Nopirin, 1988:68).

Kebijaksanaan perkreditan yang dilaksanakan pemerintah melalui Bank Indonesia terhadap bank-bank pemerintah dan swasta serta bank asing merupakan suatu alat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di sektor ekonomi. (Wijaya dan Hadiwigeno, 1992:151). Menurut Manullang (1985:66), apabila bank sentral bermaksud menyalurkan kredit perbankan, maka penyaluran kredit dapat ditingkatkan jika tingkat suku bunga diturunkan. Penetapan suku bunga kredit yang besarnya merupakan indikator tingkat profitabilitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana, menurut Dornbusch dan Fischer (1990:372), penurunan suku bunga akan meningkatkan profitabilitas investasi dan akan meningkatkan permintaan kredit. Penyaluran dan alokasi kredit bank mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat bunga, di samping faktor-faktor lain, seperti tabungan, pendapatan dan inflasi.

Permintaan kredit oleh anggota masyarakat sangat tergantung pada kegiatan ekonomi dan hasil yang diharapkan dari penggunaan kredit tersebut. Demikian juga penawaran kredit tergantung dari tingkat pendapatan, kepercayaan bank serta suku bunga yang harus dibayarkan. Menurut Wijaya (1991:450) kredit bank diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan berusaha pada dunia usaha melalui penyediaan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat bunga yang wajar dan

prosedur yang sederhana. Kredit tersebut disalurkan ke bidang-bidang masyarakat yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan (Marpaung, 1993:76).

Besar-kecilnya kredit yang disalurkan oleh bank mempunyai hubungan yang erat terhadap tingkat bunga, hal ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Rangkaian kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah pada tahun 1983 dan 1988 telah membawa dampak meningkatnya jumlah uang beredar secara cepat, hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Kebijakan moneter tersebut diatas selain membawa dampak positif pada mobilisasi dana masyarakat, juga mengandung implikasi lain. Kemudahan masyarakat memperoleh dana dari sektor perbankan bisa kurang menguntungkan, kalau tidak dialokasikan secara tepat. Kecenderungan menggunakan dana itu ke dalam kegiatan ekonomi yang lebih konsumtif daripada produktif, akan mendorong kenaikan harga, hal inilah yang menyebabkan tingginya inflasi pada tahun 1990.

Usaha pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan kebijakan uang ketat, salah satunya adalah meningkatkan besarnya suku bunga SBI yang sebelum tahun 1990 sebesar 14% namun setelah adanya kebijakan uang ketat menjadi 20%. Kenaikan tingkat suku bunga SBI dari 14% menjadi 20% menyebabkan penurunan pada kredit yang disalurkan terutama pada sektor perindustrian dari Rp 17.414 milyar menjadi Rp 16.362 milyar. Kebijakan uang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut berjalan dari tahun 1990 sampai 1992.

Upaya-upaya tersebut tampak menunjukkan hasilnya secara berarti pada tahun 1992, ketika permintaan dalam negeri yang berlebihan dan tekanan terhadap neraca pembayaran dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada menurunnya pertumbuhan impor, dan meningkatnya pertumbuhan nonmigas. Sementara itu, laju inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup rendah (4,94%). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam jangka pendek kebijakan tersebut memang memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,5 persen. Di samping itu, relatif tingginya suku bunga memperberat tingginya suku bunga juga telah memperberat perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada.

Sebagaimana diketahui kredit bermasalah timbul sebagai akibat perkembangan usaha perbankan yang terlalu cepat pada tahun 1989 dan 1990. Persaingan yang semakin tajam telah menyebabkan sejumlah bank kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan kreditnya, sehingga akhirnya mengalami masalah. Dari ilustrasi tersebut terbukti bahwa besar-kecilnya tingkat bunga mempengaruhi alokasi kredit kepada masyarakat, sehingga juga mengurangi kegairahan untuk berinvestasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofyanhadi (1994) mengenai pengaruh suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit bank umum milik negara tahun 1988-1992 menyebutkan bahwa belum tentu kenaikan tingkat suku bunga SBI mengakibatkan turunnya jumlah kredit yang disalurkan. Seharusnya dengan kenaikan suku bunga SBI, pihak bank cenderung untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk SBI, karena lebih menguntungkan daripada alokasi dalam bentuk kredit, tetapi pada hasil analisa data diatas terjadi hal sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga SBI masih dibawah kenaikan suku bunga kredit, sehingga bank tetap memilih untuk tetap berekspansi. Seharusnya dengan kenaikan suku bunga SBI, pihak bank cenderung untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk SBI, karena lebih menguntungkan daripada alokasi dalam bentuk kredit, dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik

Penelitian lain yang menjelaskan hubungan antara tingkat bunga dengan penyaluran kredit dilakukan oleh Kelana (1997). Penelitian tersebut membahas pengaruh suku bunga SBI dan SBPU terhadap penyaluran kredit pada bank umum swasta nasional periode waktu 1986-1996. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kenaikan dari tingkat bunga SBI akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan, karena dengan kenaikan suku bunga SBI, pihak bank cenderung untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk SBI, karena lebih menguntungkan daripada alokasi dalam bentuk kredit. Hal ini berarti kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rangkaian deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter yaitu Pakjun 1983 dan Pakto 1988 telah membawa dampak yang nyata pada aktivitas perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana tersebut pada pihak yang membutuhkan, jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat serta kredit yang disalurkan meningkat dengan tajam dari tahun ke tahun. Tetapi di sisi lain rangkaian deregulasi perbankan tersebut juga membawa dampak meningkatnya jumlah uang beredar secara cepat, hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Kemudahan masyarakat memperoleh dana dari sektor perbankan, bisa kurang menguntungkan jika tidak dialokasikan secara tepat. Kecenderungan menggunakan dana itu ke dalam kegiatan ekonomi yang lebih konsumtif daripada produktif, akan mendorong kenaikan harga. Hal inilah yang menyebabkan tingginya inflasi tahun 1990.

Salah satu kebijakan moneter yang digunakan pemerintah dalam pengendalian moneter adalah melalui SBI dan SBPU. SBI bersifat kontraktif, artinya untuk mengurangi jumlah uang beredar. Sedangkan SBPU bersifat ekspansif, artinya untuk menambah jumlah uang beredar. Pelaksanaan kebijaksanaan moneter tersebut dapat dilihat dengan menganalisa perkembangan perekonomian Indonesia antara tahun 1990 – 1997. Tingginya inflasi pada tahun 1990 telah mendorong pemerintah untuk menggunakan kebijakan uang ketat, salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga SBI, hal ini berlangsung sampai akhir tahun 1992. Kebijakan uang ketat tersebut ternyata ampuh untuk meredam tingginya inflasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang perlu diteliti yaitu sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh suku bunga SBI, suku bunga SBPU dan dana yang dihimpun terhadap penyaluran kredit pada bank umum milik negara dalam tahun 1990.I–1997.IV ?”

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dari suku bunga SBI, suku bunga SBPU dan dana yang dihimpun terhadap penyaluran kredit Bank Umum milik negara dalam tahun 1990.I-1997.IV.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 1.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan bahwa dana yang dihimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU diduga mempunyai pengaruh baik secara bersama-sama atau secara parsial terhadap kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara pada periode tahun 1990.I-1997.IV.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk time series dalam triwulan, yaitu data yang diperoleh dari studi literatur dan laporan tahunan Bank Indonesia, data tersebut meliputi data tentang rekening giro, deposito, tabungan, suku bunga SBI, suku bunga SBPU dan besarnya kredit yang disalurkan dengan interval tiga bulan antara tahun 1990.I-1997.IV.

### 1.5.2 Metode Analisa Data

Untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI, suku bunga SBPU dan dana yang dihimpun terhadap penyaluran kredit pada Bank umum milik negara digunakan analisis regresi non linear berganda atau dalam ekonomi adalah fungsi Cobb-Douglas. (Soelistyo, 1982:236) :

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} \epsilon$$

Transformasi ke dalam bentuk linear dapat dilakukan dengan menggunakan

$$\text{Log}Y = \text{Log}\beta_0 + \beta_i \sum \text{Log}X_i + \text{Log}\epsilon$$

Y = Besarnya kredit yang disalurkan pada tahun 1990.I-1997.IV

$\beta_0$  = Besarnya penyaluran kredit tanpa dipengaruhi variabel-variabel tak terikat atau dengan kata lain  $X_1, X_2, X_3 = 0$

$\beta_1$  = Besarnya pengaruh jumlah dana yang dihimpun terhadap besarnya kredit yang disalurkan

$\beta_2$  = Besarnya pengaruh suku bunga SBI terhadap besarnya kredit yang disalurkan

$\beta_3$  = Besarnya pengaruh suku bunga SBPU terhadap besarnya kredit yang disalurkan

$X_1$  = Besarnya dana yang dihimpun

$X_2$  = Besarnya suku bunga SBI

$X_3$  = Besarnya suku bunga SBPU

$\epsilon_1$  = Variabel pengganggu.

(1) Uji Statistik

a) Uji Statistik  $R^2$  (Koefisien Determinan)

Koefisien determinan merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur parameter

pengaruh dari variabel bebas (dana yang dihimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU) (Gujarati, 1991:139) :

$$R^2 = \frac{\beta_1 \Sigma x_1 y + \beta_2 \Sigma x_2 y + \beta_3 \Sigma x_3 y}{\Sigma y^2}$$

b) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dapat mempengaruhi perubahan dari variabel terikat (Gujarati, 1991:141)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

di mana :

$R^2$  = koefisien determinan

K = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya sampel

Kriteria pengujian ;

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Penelitian ini menggunakan derajat keyakinan sebesar 90% dengan maksud bahwa dalam perkembangan perekonomian atau ilmu sosial terdapat variabel lain yang tidak diketahui yang ikut berpengaruh, maka diambil derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) sebesar 0,10

Dengan menggunakan  $\alpha = 0,10$  , maka apabila :

1.  $F_{hitung} > F_{tabel}$ ..... $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima.

Hal ini berarti ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2.  $F_{hitung} < F_{tabel}$ ..... $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak.

Hal ini berarti tidak ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

- c. Untuk uji individu pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan uji t statistik :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_1}{S\beta_1}$$

Kriteria pengujian ;

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Dengan menggunakan  $\alpha = 0,10$  , maka apabila :

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ..... $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima.

Hal ini berarti ada pengaruh atau keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2.  $t_{hitung} < t_{tabel}$ ..... $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak.

Hal ini berarti tidak ada pengaruh atau keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

## (2) Uji Ekonometri

### 1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna / hampir sempurna antara variabel bebas sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh setiap variabel tersebut. Gejala terjadi hubungan kolinearitas ganda dapat diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 1991:166) :

- membuat regresi di antara variabel bebas dengan salah satu variabel bebas dijadikan variabel terikat secara bergantian, kemudian nilai koefisien determinasi pada masing-masing persamaan.
- menghitung nilai F masing-masing persamaan, kemudian dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,10$  jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  berarti terdapat kolinearitas ganda.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian komponen pengganggu ( $e$ ) dari masing-masing variabel semakin besar yang berarti bahwa varian penaksir tidak efisien dan uji hipotesis kurang valid. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi digunakan Rank Spearman's Correlation test (Gujarati, 1991:189)

## 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi biasanya terjadi pada data yang disusun secara berkelompok (time series data), akibat dari autokorelasi adalah kurang baiknya nilai penaksir serta tidak validnya model regresi yang digunakan.

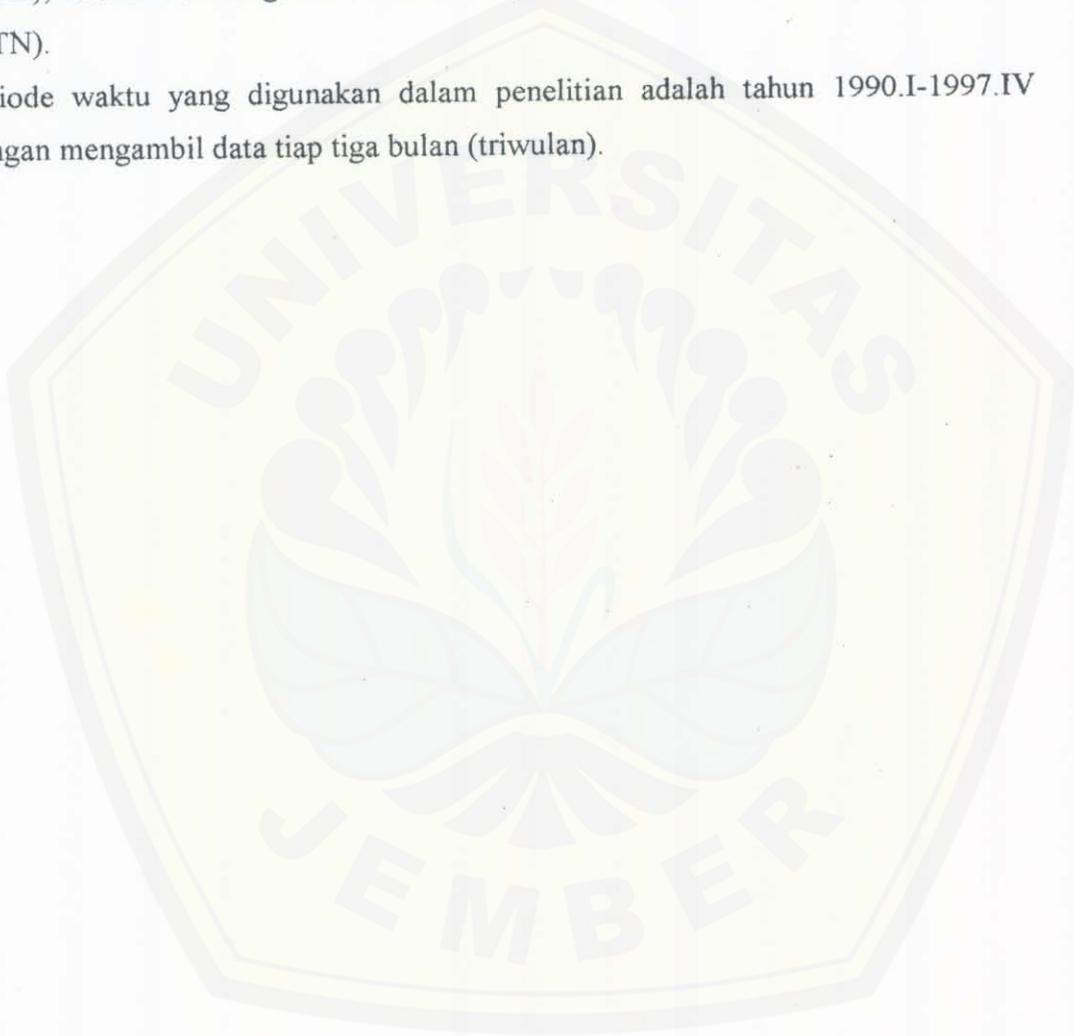
Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi maka dapat digunakan pendekatan Durbin Watson Test (Gujarati, 1991:216)

### 1.8 Definisi Operasional

Batasan-batasan pengertian yang digunakan dalam materi penelitian ini penting untuk diketahui, hal ini untuk menghindari adanya penafsiran yang salah sehingga cenderung semakin meluasnya permasalahan, batasan pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dana yang dihimpun merupakan dana yang dapat dihimpun oleh semua bank umum milik negara, dana tersebut berasal dari rekening giro, deposito dan tabungan dalam tahun 1990.I-1997.IV.
- b. Tingkat bunga SBI adalah besarnya tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai penerbit dari surat berharga tersebut pada periode tahun 1990.I-1997.IV.
- c. Tingkat bunga SBPU adalah besarnya tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1990.I-1997.IV, sedangkan pihak yang mengeluarkan surat berharga tersebut adalah bank-bank umum.
- d. Penyaluran kredit adalah besarnya kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara dalam tahun 1990.I-1997.IV.

- e. Bank umum milik negara merupakan bank umum yang dikelola oleh pemerintah dan penjaminan uang nasabah dilakukan oleh pemerintah, bank umum pemerintah terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI 1946), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Nasional (BDN), Bank Expor-Import (Bank Exim), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), Bank Tabungan Negara (BTN).
- f. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 1990.I-1997.IV dengan mengambil data tiap tiga bulan (triwulan).



## II. GAMBARAN UMUM BANK UMUM MILIK NEGARA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN SURAT BERHARGA PASAR UANG

### 2.1 Latar belakang Berdirinya Bank Umum Milik Negara

Menurut UU No. 14/1967 dalam pasal 5 disebutkan bahwa bank umum milik negara didirikan dengan Undang-Undang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pasal 5 UU No. 14/1967 digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan undang-undang tentang pendirian bank umum milik negara. Dalam hal ini yang dimaksud bank umum milik negara adalah :

#### 1. Bank Negara Indonesia (BNI 1946)

BNI '46 ditetapkan dengan UU No 17/1968 dengan tugas dan usaha pokok diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, dengan melakukan usaha sebagai bank umum devisa yang mengutamakan sektor industri.

#### 2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

UU No 21/1968 menetapkan pendirian BRI berdasarkan pola dan struktur kehidupan perkreditan dan perbankan sesudah tahun 1968. Menurut pasal 7 UU No 21/1968, secara lengkap tugas dan usaha BRI diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan cara menjalankan usaha bank umum, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek dengan mengutamakan:

##### a. Pemberian kredit pada sektor koperasi, petani dan nelayan yang meliputi:

- membantu perkembangan koperasi terutama yang bergerak dalam bidang pertanian dan perikanan.
- membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan



serta mendorong dan membimbing ke arah usaha bersama berdasarkan asas sendi perekonomian/perkoperasian.

- b. Membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan yang menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil
  - c. Pemberian bantuan terhadap usaha yang dijalankan pemerintah dalam rangka pelaksanaan politik agraria.
  - d. Pemberian bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa.
  - e. Pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank-bank sejenis berdasarkan petunjuk dan pimpinan BI.
3. Bank Ekspor-Import (Bank Exim)

Bank Exim merupakan salah satu bank umum devisa milik negara, secara resmi didirikan pada tahun 1968 dengan UU No 22/1968. Menurut pasal 7 undang-undang tersebut, tugas dan usaha bank ini diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melaksanakan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.

4. Bank Bumi Daya (BBD)

Bank ini didirikan pada tahun 1968 berdasarkan UU No 19/1968. Menurut pasal 7 undang-undang tersebut, tugas dan usaha bank diarahkan pada pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan sektor perkebunan. Karena kemampuan likuiditas bank terbatas maka kredit untuk sektor perkebunan dan kehutanan secara fleksibel dapat juga diberikan oleh dan bersama-sama dengan bank umum lainnya. Demikian pula kredit untuk angkutan darat, laut dan udara.

## 5. Bank Dagang Negara (BDN)

UU No 7/1968 menetapkan pendirian BDN dengan tugas dan usaha yang diarahkan pada pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan sektor pertambangan.

Jumlah bank-bank milik pemerintah seluruhnya ada tujuh jenis bank, terdiri dari lima bank umum, satu bank pembangunan dan satu bank tabungan. Dalam operasionalnya ternyata perbedaan antara bank umum dan bank pembangunan tidak jauh berbeda. Bank umum dan bank pembangunan milik pemerintah keduanya memberikan kredit jangka pendek untuk modal kerja dan jangka panjang, tetapi telah nampak bahwa bank pembangunan lebih memusatkan pada kegiatan pembiayaan modal tetap jangka panjang.

Berlakunya UU no 7 tahun 1992, pada 25 Maret 1992 maka secara otomatis UU no.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan UU no.7 tahun 1992 pasal 5 disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan BPR. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah melakukan perubahan bentuk hukum bank pemerintah menjadi perusahaan perseroan (PERSERO), dan perubahan jenis usaha bank pembangunan dan bank tabungan menjadi bank umum. Perubahan tersebut ditegaskan dengan peraturan pemerintah, yaitu :

1. PP No.19 Tahun 1992 : BNI 46
2. PP No.20 Tahun 1992 : BDN
3. PP No.21 Tahun 1992 : BRI
4. PP No.22 Tahun 1992 : EXIM
5. PP No.23 Tahun 1992 : BBD
6. PP No.24 Tahun 1992 : BTN
7. PP No.25 Tahun 1992 : BAPINDO

## 2.2 Jumlah Dana yang Dihimpun pada Bank Umum Milik Negara di Indonesia

Simpanan masyarakat di bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri atas tabungan, giro dan deposito. Simpanan masyarakat pada bank umum selain digunakan untuk menjaga likuiditas bank juga digunakan untuk investasi pada hal-hal yang menguntungkan, misalnya disalurkan melalui kredit/pinjaman, dibelikan SBI, SBPU dan lain-lain. Semakin banyak simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun maka keuntungan yang akan diraih oleh pihak bank kemungkinan besar juga akan terus bertambah. Hal ini menyebabkan pihak bank terus mengupayakan pengerahan dana masyarakat, misalnya dengan mengadakan undian berhadiah, memperbaiki pelayanan pada para nasabah dan lain sebagainya.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan 1997 dana yang dihimpun perbankan cenderung meningkat, peningkatannya rata-rata sebesar 15,39 %. Peningkatan terbesar terjadi pada tabungan masyarakat yaitu sekitar 7,6713% disusul kemudian oleh deposito dan giro masing-masing sekitar 4,3043% dan 3,4144% per tahun. Sejak tahun 1994 sampai tahun 1997 peningkatan jumlah dana yang terhimpun sangat besar, hal ini disebabkan salah satunya adalah meningkatnya jumlah kantor bank, yang mana pada tahun 1994 terdapat 1.171 buah jumlah kantor cabang bank pemerintah. Jumlah ini terus mengalami peningkatan, sampai akhirnya pada tahun 1997 sebanyak 1.476 gedung untuk kantor cabang telah didirikan oleh bank pemerintah

Tabel 1. Dana yang Dihimpun Oleh Bank Umum Milik Negara untuk Periode Tahun 1990.I-1997.IV. (dalam miliar Rp)

TAHUN	TRIWULAN (dalam milyar)				
	I	II	III	IV	TOTAL
1990	30.373	33.594	37.581	40.638	142.186
1991	34.059	37.343	40.244	41.813	153.459
1992	42.448	46.03	49.598	52.6	190.676
1993	54.26	55.098	62.853	61.683	233.894
1994	59.356	60.604	62.107	64.283	246.35
1995	63.513	65.775	69.339	75.663	274.29
1996	76.781	82.129	84.775	90.434	334.119
1997	83.602	91.81	102.991	103.85	382.253

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

### 2.3 Perkembangan Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank Umum Milik Negara

Besarnya kredit yang disalurkan oleh perbankan tidak lagi sejalan dengan tujuan stabilisasi perekonomian dalam masa setelah deregulasi 1 Juni 1983, tidak lagi dicapai melalui kebijakan pagu kredit tetapi dikendalikan dengan menggunakan piranti pasar terbuka. Sektor-sektor yang diprioritaskan serta dibiayai oleh campuran kredit likuiditas BI dan dana masyarakat, sebagian dialihkan pembiayaan ke dana masyarakat. Keadaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan BUMN dalam penyaluran kredit.

Pada tabel 2 terlihat bahwa selama periode 1990.I-1997.IV volume kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum pemerintah tersebut pada akhir tahun 1990 sebesar Rp 53.524 milyar telah meningkat menjadi Rp 110.550 milyar pada akhir tahun 1997

Tabel 2. Perkembangan Kredit Bank Umum Milik Negara untuk Periode Tahun 1990.I-1997.IV (dalam milyar Rupiah)

TAHUN	TRIWULAN (dalam milyar)				
	I	II	III	IV	TOTAL
1990	42.589	46.915	51.028	53.524	194.056
1991	54.699	57.036	56.739	59.861	228.335
1992	61.751	63.357	66.145	68.236	259.489
1993	69.066	69.217	71.143	71.76	281.186
1994	73.443	74.274	77.436	80.01	305.163
1995	81.333	86.422	91.431	93.48	352.666
1996	95.619	100.379	104.059	108.925	408.982
1997	110.9	117.057	110.5	110.55	449.007

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

#### 2.4 SBI dan SBPU

Ketentuan tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) semula diatur dengan SK. Direksi BI No. 16/55/Kep/Dir dan SK BI No. 16/8/UPUM, keduanya tertanggal 21-1-1984. Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan SK Direksi BI No. 21/52/Kep/DP dan SEBI No. 21/30/SEBI/UPG, keduanya tertanggal 27 Oktober 1988 dan merupakan salah satu ketentuan kebijakan 27 Oktober 1988. Dengan dikeluarkannya SK Direksi BI No.28/84/Kep/Dir, dan SE No. 28/83/UPG tertanggal 13 Oktober 1995, maka SK direksi yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan dicabut dan kali ini merupakan upaya BI dalam menyempurnakan segala ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan perdagangan SBI dalam memperlancar operasi pasar terbuka.

SBI merupakan surat berharga atas unjuk Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. Selain untuk pelaksanaan operasi pasar terbuka, penerbitan juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana terutama oleh bank dan LKBB. SBI yang semula diterbitkan dalam tiga denominasi/pecahan dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- dan

setelah pakto'88 diperbanyak menjadi sembilan denominasi dari Rp 25.000.000,- dan Rp 10.000.000.000. Jangka waktu SBI terdiri dari 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal jatuh tempo.

BI melakukan penjualan dan pembelian SBI dengan sistem lelang melalui primary dealer dan bilamana diperlukan dapat melakukan penjualan dan pembelian SBI dengan cara langsung kepada bank atau melalui primary dealer dan jasa perusahaan pialang pasar uang.

Penerbitan SBI dilakukan dalam bentuk :

1. Lelang tetap mingguan yang dilakukan setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya kalau hari Rabu jatuh pada hari libur.
2. Lelang tetap harian yang disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian moneter.

Peserta lelang mengajukan penawaran untuk membeli SBI/menjual SBPU melalui primary dealer yang ditunjukkan oleh BI pada jadwal yang telah ditentukan dengan mencantumkan :

1. Jumlah penawaran
2. Bunga diskonto
3. Rincian denominasi SBI
4. Jangka waktu.

Kedua jenis lelang tersebut dilakukan dengan sistem target kuantitas (Sistem Stop Out Rate) yaitu penetapan tingkat diskonto yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target jumlah SBI yang akan dijual BI. Apabila penawaran diskonto menghasilkan tingkat SOR yang dianggap diluar toleransi kualitatif, maka seluruh penawaran ditolak dan target lelang dijual dalam bentuk SBI berjangka waktu 1 bulan kepada seluruh primary dealer dengan alokasi secara proporsional menurut bidang komitmen dan diskonto yang dipergunakan adalah SOR pada lelang atau dapat disesuaikan oleh BI berdasarkan perkembangan suku bunga di pasar uang, apabila dipandang perlu.

Ketentuan perdagangan SBPU diatur dengan SK Direksi BI No. 17/57/Sep/Dir dan SE BI No. 17/6/UPUM tanggal 28 Januari 1985, kemudian ketentuan tersebut disempurnakan dengan SK Direksi BI No. 21/53/Kep/Dir dan SE BI No. 21/31/PG tanggal 27 Oktober '88.

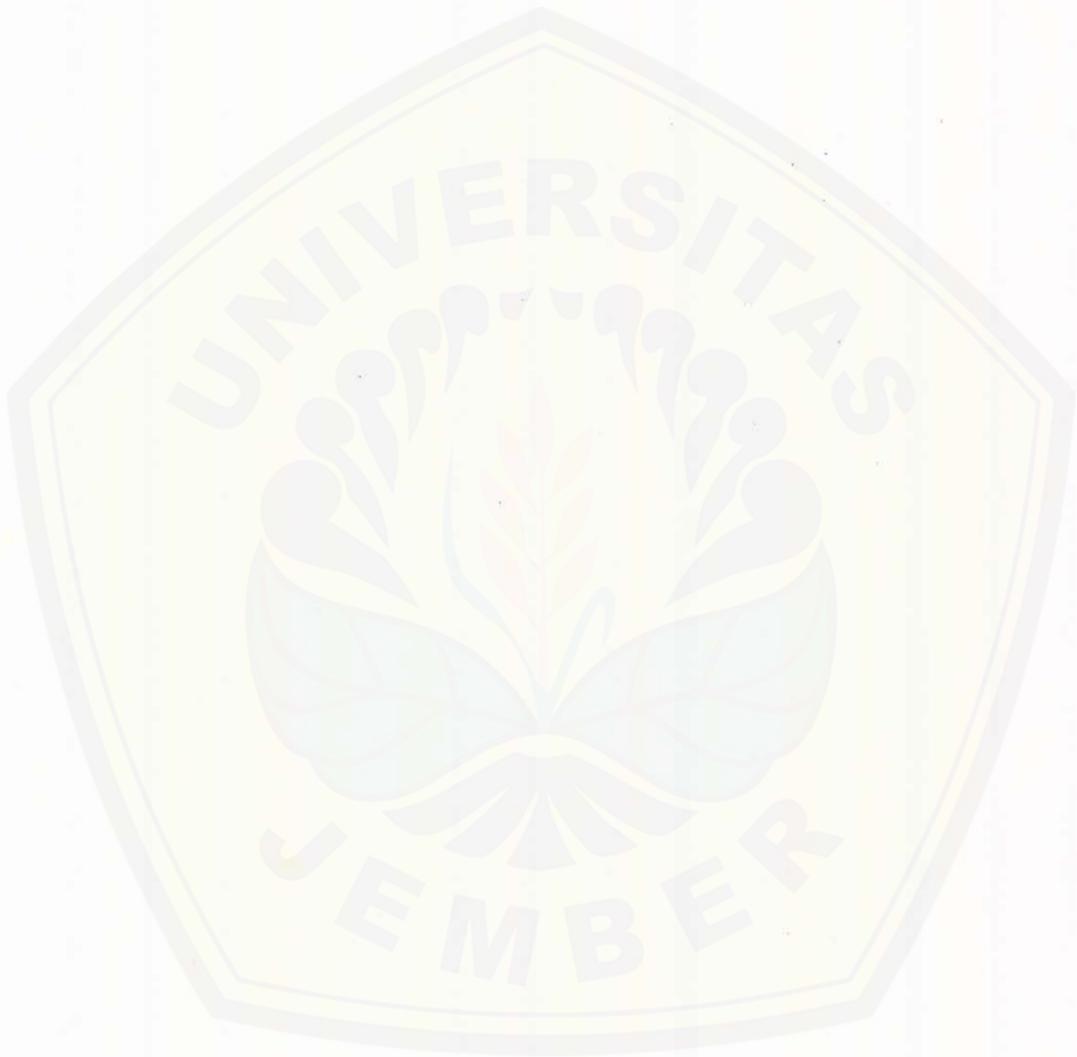
SBPU adalah surat berharga dalam Rupiah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Selain untuk pelaksanaan operasi pasar terbuka, perdagangan SBPU juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana terutama oleh bank dan LKBB. Ditinjau dari segi warkatnya, SBPU terdiri atas :

1. Surat Sanggup (aksep/promes) yang dapat berupa :
  - a. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau LKBB.
  - b. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank atau LKBB dalam rangka pinjaman antar bank.
2. Surat wesel yang dapat berupa :
  - a. Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu.
  - b. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

SBPU harus memenuhi persyaratan ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, kertas dan mutu cetaknya harus baik. Dalam penulisannya harus benar-benar diperhatikan unsur pengamanannya, sehingga perlu diciptakan ciri-ciri pengamanan dan tulisan yang peka terhadap penghapusan biasa maupun dengan cara kimia. Dalam hal penerbitan surat sanggup, harus dipenuhi ketentuan pasal 174 KUHD, sedangkan dalam hal wesel harus dipenuhi pasal 100 KUHD

Salah satu syarat yang diperlukan agar pasar uang dapat berjalan dengan lancar adalah tersedianya surat berharga yang dapat dipercaya (solid). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pasar uang percaya bahwa surat berharga dapat ditunaikan dengan mudah pada saat jatuh tempo. Untuk kepentingan itu, di samping

harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, SBPU yang diperdagangkan harus menunjuk bank atau LKBB tertentu sebagai tempat penagihan pada saat SBPU jatuh tempo.



### III. LANDASAN TEORI

#### 3.1 Bank Umum sebagai Lembaga Perantara Keuangan

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghubung antara pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang lain. Definisi bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 adalah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank sebagai perantara keuangan atau financial intermediary memiliki tiga fungsi umum, yaitu :

1. Sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang.

Bank memberikan surat atau selebar kertas dalam bentuk :

a. Rekening koran atau giro (demand deposit)

Rekening koran atau giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran. Dalam pelaksanaannya giro diletakkan oleh bank dalam suatu rekening yang lazim disebut rekening koran.

b. Tabungan

Definisi tabungan menurut ketentuan yang berlaku adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

c. Deposito

Deposito merupakan simpanan dititipkan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Deposito yang paling banyak dijumpai adalah deposito atas nama, yang oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan di pasar. (Soediyono, 1992:57)

## 2. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya. Jika keduanya melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.

## 3. Sebagai lembaga penyalur kredit

Bank dalam hal ini dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank tersebut dikarenakan tidak semua orang sekaligus akan mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang tersebut dilakukan dengan menyalurkannya pada pihak yang membutuhkan kredit atau dibelikan surat-surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga, atau bank melakukan ekspansi kredit.

Fungsi bank umum dalam melakukan ekspansi kredit yaitu dengan cara penciptaan uang giral (money creation). Penciptaan uang ini dapat berlangsung jika ada kelebihan cadangan (excess reserve) yang harus dipegang. Semakin besar simpanan masyarakat (primary deposit), akan semakin besar pula ekspansi kredit yang ada. (Iswardono, 1990:60)

### 3.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bank

Pola pengelolaan bank sebagai bank umum yang mencari keuntungan sangat penting dalam kemajuan kehidupan bank itu sendiri. Menurut Nopirin (1993:25) pola pengelolaan bank umum pada dasarnya bersumber dari dua pola pokok yang ekstrim yaitu pola pengelolaan yang konservatif dan pola pengelolaan yang agresif. Dua pola pengelolaan tersebut kemudian dikembangkan lagi sehingga muncullah pola pengelolaan yang moderat.

Pola pengelolaan konservatif pada dasarnya tidak menyukai adanya resiko yang banyak, walaupun harus diimbangi dengan tingkat pendapatan yang rendah. Tipe pola seperti ini lebih menitik beratkan pada penggunaan dana intern, sehingga tidak terlalu mengandalkan pinjaman dari luar. Pola pengelolaan bank seperti ini banyak dianut oleh bankir-bankir masa lalu yang lebih banyak pasif daripada aktif.

Pola pengelolaan yang agresif lebih menekankan pada orientasi keuntungan, meskipun tak jarang pula harus menanggung resiko yang besar. Pola seperti ini selalu berusaha untuk mendapatkan dana dari luar asalkan biaya totalnya masih lebih rendah daripada pendapatannya.

Pada umumnya kalangan perbankan menggunakan pola pengelolaan yang moderat, yang sekaligus memperhatikan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, yaitu pelayanan yang memuaskan bagi nasabah dan perolehan keuntungan bagi bank. Pola pengelolaan moderat mempunyai dua prinsip, pertama prinsip likuiditas, yaitu prinsip bahwa bank harus dapat menjamin likuiditasnya, kedua prinsip profitabilitas, yaitu suatu prinsip bahwa bank harus mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya, sebab keuntungan akan menjamin kelangsungan usaha tersebut.

Terdapat tiga pendekatan untuk mencapai optimalisasi antara prinsip likuiditas dan prinsip profitabilitas, yaitu: (Nopirin, 1993:28)

a. The pool of funds approach

The pool of funds approach pada intinya adalah mengumpulkan dana yang terhimpun (giro, deposito, tabungan dan modal) menjadi satu dalam satu pool, kemudian dialokasikan sesuai dengan kriteria tertentu ke dalam masing-masing bentuk kekayaan. Alokasi didasarkan atas prioritas penggunaan dana yang sesuai dengan proporsi untuk masing-masing jenis kekayaan.

b. The asset allocation approach

The asset allocation approach berpendapat bahwa alokasi dana itu memerlukan perumusan yang baik dari pimpinan bank. Pendekatan ini biasanya disertai dengan pembentukan sentra likuiditas profitabilitas. Artinya suatu sentra yang mengalokasikan dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu untuk penggunaan tertentu.

c. The Management science approach

The management science approach adalah pendekatan berdasarkan pada teori atau ilmu pengetahuan. Dalam pendekatan ini ada tiga teori, yaitu: (1)

Commercial loan theory; (2) Shiftability theory, dan (3) The doctrine of anticipated income theory.

Commercial loan theory menyatakan bahwa bank sebaiknya hanya memberi pinjaman jangka pendek saja yang sifatnya produktif dan sekiranya dapat membayar kembali pinjaman itu dari hasil usaha yang dibiayai dari pinjaman itu (self liquidity credit). Hal ini didasari pertimbangan bahwa sebagian besar sumber dana bank yang dititipkan adalah dalam jangka pendek, sehingga pinjaman yang diberikanpun juga sebaiknya dalam jangka pendek.

Shiftability theory berdasarkan pertimbangan bank itu mampu menukarkan suatu bentuk kekayaan dengan bentuk kekayaan lainnya untuk memenuhi likuiditasnya. Bentuk kekayaan yang disarankan teori ini adalah dalam bentuk surat berharga. Memang kemungkinan terdapat kesulitan apabila terdapat banyak bank umum yang menjual surat berharga, sehingga harganya menjadi turun, namun dalam hal demikian, bank umum dapat menjual surat berharga tersebut pada bank sentral sehingga masalah likuiditasnya dapat diatasi.

The doctrine of anticipate income theory menyatakan bahwa yang penting pinjaman itu dapat dibayar kembali. Dengan demikian yang perlu dianalisis adalah kemungkinan peminjam itu membayar hutangnya di kemudian hari. Oleh karena itu bank harus dapat mengantisipasi kemungkinan dapatnya dibayar peminjam itu, bukan hanya ditentukan oleh pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari kegiatan yang langsung dibiayai oleh peminjam itu.

### **3.3 Skala Prioritas Penggunaan Dana**

Permasalahan mengenai skala prioritas penggunaan dana dalam bidang usaha perbankan ada hubungannya dengan konflik antara keamanan (safety) dengan tingkat laba (profitability). Tujuan untuk dapat dicapainya tingkat keamanan yang tinggi, atau dengan kata lain tujuan untuk terhindarnya bank dari resiko yang tinggi, hanya dapat dicapai kalau bank mau mengorbankan tingkat laba yang tinggi.

Sebaliknya apabila bank menghendaki profitability, maka tingkat keamanan, sekalipun dalam jumlah yang kecil, perlu dikorbankan.

Bank dalam menghadapi masalah pilihan antara rentabilitas dengan likuiditas atau antara resiko rendah dengan resiko tinggi digunakan resep skala prioritas penggunaan dana, yang isinya adalah sebagai berikut :

## 1. Cadangan Primer atau Primary Reserve

Prioritas paling tinggi yang harus dipegang teguh oleh setiap bank ialah dipenuhinya kebutuhan akan cadangan primer. Cadangan primer ini diperlukan sebagian untuk memenuhi tuntutan hukum (legal reserve requirement), sedangkan sebagian lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Karakteristik dasar untuk cadangan primer ini ialah bahwa aktiva ini tidak mendatangkan pendapatan bagi bank.

## 2. Cadangan sekunder (secondary reserve)

Cadangan sekunder mempunyai dua fungsi: fungsi utamanya ialah untuk likuiditas dan fungsi kedua adalah untuk rentabilitas. Dengan demikian sifat-sifat aktiva yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai cadangan sekunder bentuknya harus tidak jauh dari bentuk uang tunai/kas, dalam arti mudah diuangkan atau dijual tanpa banyak disertai dengan menurunnya harga, dan syarat kedua ialah bahwa aktiva tersebut juga harus mendatangkan pendapatan bagi pemiliknya, sekalipun tingkat pendapatan yang diperoleh dari cadangan sekunder tersebut pada umumnya rendah, maka berbagai macam instrumen kredit jangka pendek pasar uang tepat untuk dipergunakan sebagai cadangan sekunder.

Berbagai macam surat berharga yang memiliki tingkat likuiditasnya paling tinggi di antaranya ialah:

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
2. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
3. Obligasi atau Surat Berharga Pasar Modal (SBPM).

Penentuan besarnya cadangan sekunder sepenuhnya merupakan wewenang dari bank sendiri untuk menentukannya atau dengan kata lain merupakan masalah internal bank.

### 3.4 Pengertian Kredit

Salah satu kegiatan pokok bank dalam kegiatan pengalokasian dana adalah menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada nasabah. Menurut Undang-Undang No.7 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kegiatan penyaluran kredit bank umum tersebut pada prinsipnya dapat dibagi dalam tiga sasaran pokok yaitu sebagai berikut :

- a. untuk memenuhi kebutuhan kredit oleh masyarakat yang merupakan tugas bank-bank umum.
- b. untuk menciptakan dan atau memperkuat hubungan nasabah dengan membiayai usaha-usaha yang memenuhi syarat untuk diberi kredit.
- c. Kegiatan perkreditan merupakan sumber utama dari hasil usaha bank. Pentingnya penyaluran kredit bagi perbankan dapat dilihat dari komposisi penyaluran dananya yang sampai saat ini tetap didominasi oleh pos kredit.

Kebijaksanaan perkreditan yang dilaksanakan pemerintah melalui Bank Indonesia terhadap bank-bank pemerintah dan swasta serta bank asing merupakan suatu alat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di sektor ekonomi. Menurut Manullang (1985:66), apabila bank sentral bermaksud menyalurkan kredit perbankan, maka penyaluran kredit dapat ditingkatkan jika tingkat suku bunga diturunkan. Penetapan suku bunga kredit yang besarnya merupakan indikator tingkat profitabilitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana, penurunan suku bunga akan meningkatkan profitabilitas investasi dan akan meningkatkan permintaan kredit.

Penyaluran dan alokasi kredit bank mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat bunga, di samping faktor-faktor lain, seperti tabungan, pendapatan dan inflasi.

Permintaan kredit oleh anggota masyarakat sangat tergantung pada kegiatan ekonomi dan hasil yang diharapkan dari penggunaan kredit tersebut. Demikian juga penawaran kredit tergantung dari tingkat pendapatan, kepercayaan bank serta suku bunga yang harus dibayarkan. Menurut Wijaya (1991:450) kredit bank diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan berusaha pada dunia usaha melalui penyediaan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat bunga yang wajar dan prosedur yang sederhana. Kredit tersebut disalurkan ke bidang-bidang masyarakat yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam membuat perencanaan kredit yang akan disalurkan, bank perlu memperhatikan faktor-faktor intern atau ekstern yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi kredit. Faktor intern meliputi kemampuan permodalan bank dan tersedianya tenaga kerja yang berpengalaman, sedangkan faktor ekstern meliputi kebijakan-kebijakan moneter dan perekonomian secara umum.

Faktor-faktor yang membatasi perkembangan kredit bank adalah sebagai berikut:

#### I. Faktor Intern :

- a. Kemampuan permodalan
- b. Tenaga kerja yang berpengalaman

#### II. Faktor Ekstern :

##### 1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter pemerintah yang dapat membatasi perkembangan kredit bank antara lain :

- a. Cadangan atau likuiditas wajib minimum
- b. Operasi pasar terbuka terutama untuk tujuan Tight Money Policy atau kebijakan uang ketat
- c. Penetapan pagu kredit perbankan

d. Tingkat bunga diskonto

2. Situasi perekonomian secara umum

Dalam situasi siklus ekonomi mengalami kelesuan, bagi bank jika tetap melakukan ekspansi kredit maka daya serap pasar relatif terbatas.

### 3.5 Pasar Uang dan Tingkat Bunga

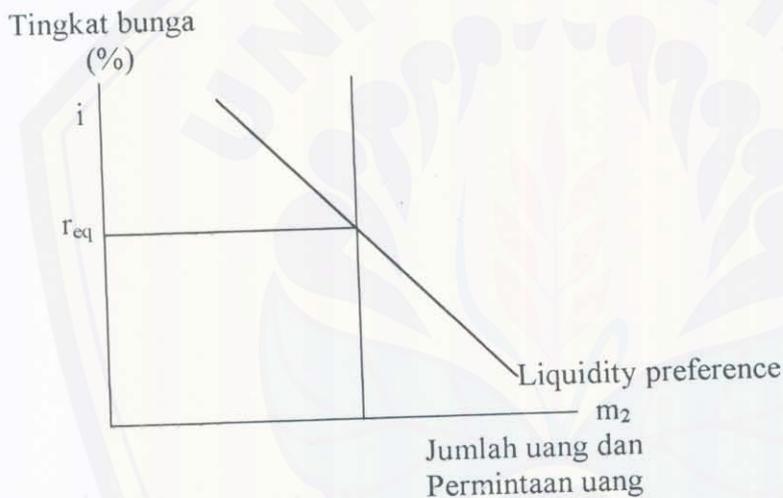
Tingkat bunga menurut Keynes merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi situasi perekonomian.

Uang menurut Keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang seperti misalnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai komposisi dari kekayaan mereka akan diwujudkan dalam bentuk uang kas, tabungan dan surat berharga akan menentukan tingginya tingkat bunga.

Keynes menyederhanakan modelnya dengan membagi komposisi kekayaan dalam dua bentuk, yakni uang kas dan surat berharga (obligasi). Keuntungan apabila kekayaan diwujudkan dalam bentuk uang kas adalah kemudahan dalam melakukan transaksi sebab uang kas merupakan alat pembayaran yang paling likuid. Likuid diukur dengan kecepatan menukar kekayaan dalam bentuk alat pembayar (untuk transaksi) tanpa adanya kerugian nilai. Jadi, menyimpan uang dalam bentuk uang kas tidak mempunyai resiko capital gain atau capital loss. Selain itu kekayaan dalam bentuk uang kas tidak dapat menambah penghasilan yang berupa bunga. Sebaliknya kekayaan dalam bentuk surat berharga, yang mana harganya dapat naik-turun tergantung dari besarnya tingkat bunga, sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menghadapi resiko capital gain atau capital loss. Namun surat berharga mendatangkan pendapatan yang berupa bunga. Dengan anggapan bahwa masyarakat

itu tidak punya resiko maka mereka akan mau memegang bentuk kekayaan yang resikonya tinggi (surat berharga) apabila didorong dengan tingkat yang tinggi pula. Makin banyak surat berharga dalam susunan kekayaan, resikonya juga makin tinggi. Oleh karena itu harus didorong dengan tingkat bunga yang lebih tinggi pula. Tingkat bunga di sini adalah tingkat bunga "rata-rata" dari segala macam surat berharga yang beredar dalam masyarakat.

Permintaan akan uang yang oleh Keynes disebut dengan Liquidity Preference tergantung dari tingkat bunga. Dalam gambar 1 sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang dengan sumbu vertikal untuk tingkat bunga.



Gambar 1. Teori Keynes tentang tingkat bunga

Permintaan akan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Keynes mengatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat bunga yang normal. Apabila tingkat bunga turun di bawah tingkat bunga yang normal, mereka yakin bahwa tingkat bunga akan naik kembali ke tingkat bunga normal. Jika mereka memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (dus, harganya turun) mereka akan mendapat kerugian (capital loss). Mereka akan menghadapi kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang kas yang dipegang, pada waktu tingkat bunga naik. Hubungan ini disebut motif

spekulasi permintaan uang kas sebab mereka melakukan spekulasi tentang harga surat berharga di masa yang akan datang. Kedua, berkaitan dengan ongkos memegang uang kas (opportunity of holding money). Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula ongkos memegang uang kas, sehingga keinginan menggunakan uang kas juga turun. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang kas turun sehingga permintaan akan uang kas akan naik.

Kedua pendekatan di atas menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan terhadap uang kas. Bersama dengan jumlah uang yang beredar tetap (dengan anggapan bahwa uang yang beredar ini ditetapkan oleh pemerintah), permintaan uang ini menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga dalam keseimbangan ( $r_{eq}$  pada gambar 1) apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya (jumlah uang beredar). Apabila pada suatu ketika tingkat bunga di bawah tingkat keseimbangan, masyarakat akan menginginkan uang kas lebih banyak dengan cara menjual surat berharga yang dipegangnya. Usaha menjual surat berharga ini akan mendorong harganya turun (tingkat bunga naik), sampai ke tingkat keseimbangan yang mana masyarakat sudah puas dengan komposisi kekayaannya (permintaan sama dengan penawaran uang). Sebaliknya, apabila tingkat bunga berada di atas keseimbangan, masyarakat menginginkan uang kas lebih sedikit dengan cara membeli surat berharga. Pembelian ini akan mengakibatkan naiknya harga surat berharga (tingkat bunga turun) sampai keseimbangan tercapai.

### 3.6 Operasi Pasar Terbuka sebagai Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan moneter dari pemerintah mempunyai tujuan disamping untuk kestabilan harga juga untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan ini, akumulasi modal perlu ditingkatkan. Mengingat bahwa pasar modal belum berkembang maka masyarakat pada umumnya menyimpan kekayaannya dalam bentuk kas atau deposito bank. Oleh karena itu kebijaksanaan tingkat bunga dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah deposito sehingga dapat digunakan untuk investasi. Caranya tingkat bunga ditentukan berbeda-beda, tergantung jangka waktunya. Di samping

akumulasi tabungan, kebijaksanaan tingkat bunga ditujukan pula untuk mengadakan alokasi dana/investasi. Untuk tujuan ini Bank Indonesia menentuka tingkat bunga yang berbeda-beda tergantung dari penggunaan kredit. Kredit yang diperuntukkan kegiatan-kegiatan yang mendapat prioritas pemerintah dikenakan bunga yang lebih rendah dibanding dengan yang tidak diprioritaskan.

Operasi pasar terbuka merupakan salah satu dari instrumen kebijaksanaan moneter yang diterapkan di Indonesia. Operasi ini mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pembelian atau penjualan obligasi pemerintah. Pemegang obligasi pemerintah yang terbesar adalah bank-bank komersial. Nopirin (1990:56) menyebutkan bahwa tindakan membeli dan menjual surat-surat berharga oleh bank sentral dalam politik pasar terbuka akan berpengaruh pada : (1) Meningkatnya cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi, sebab dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menambah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut, yang ada pada bank sentral. Akibat tambahannya cadangan tersebut maka bank umum dapat menambah jumlah uang beredar, misalnya melalui proses penciptaan kredit. (2) Tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga surat-surat berharga. Akibatnya tingkat bunga umum juga akan terpengaruhi.

Instrumen dari politik pasar terbuka berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI mulai dikenalkan pada perbankan nasional pada 1 Februari 1984 oleh Bank Indonesia, sedangkan SBPU mulai dikeluarkan pada tahun 1985 oleh bank sentral. Di dalam pelaksanaannya kedua instrumen yang digunakan ini mempunyai sifat yang satu sama lain berbeda, di mana SBI bersifat kontraktif, artinya untuk mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan SBPU bersifat ekspansif, artinya menambah jumlah uang yang beredar. Walau pada dasarnya kedua instrumen ini sama yaitu sama-sama mempengaruhi jumlah uang beredar. Bila suku bunga dianggap terlalu tinggi, bank sentral dapat membeli SBPU dengan suku bunga relatif rendah untuk menurunkan suku bunga tersebut. Sebaliknya apabila suku bunga dianggap terlalu rendah, diusahakan menjual SBI dengan suku

bunga yang relatif tinggi. Dari hal tersebut kebijaksanaan suku bunga dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah deposito sehingga dapat disalurkan melalui investasi dan untuk penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Perubahan tingkat bunga dan harga pada surat-surat berharga pemerintah akan mempunyai efek berantai terhadap tingkat bunga-tingkat bunga yang lain termasuk (harga surat berharga) swasta. Selanjutnya perubahan tingkat bunga yang menyeluruh ini mempunyai pengaruh terhadap perilaku lembaga keuangan tersebut dalam penyediaan dana kredit untuk para peminjam. Jika tingkat bunga meningkat maka lembaga-lembaga penyedia dana-dana kredit (bank maupun bukan bank) akan bereaksi dengan memperkuat penyedia kredit kepada peminjam-peminjam. Sebaliknya, bila tingkat bunga menurun, maka ini akan diinterpretasikan oleh lembaga-lembaga tersebut sebagai pertanda bahwa situasi keuangan menjurus pada “uang murah” dan akibatnya mereka akan memperlunak syarat-syarat dan jumlah penyediaan kredit kepada nasabahnya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Secara umum data perkembangan rata-rata dari lampiran 1b memperlihatkan bahwa sejak tahun 1990-1997 dana yang dihimpun oleh perbankan cenderung meningkat (rata-rata 15,3%). Hal ini merupakan akibat deregulasi perbankan, yaitu pakto 1988 yang memberikan kemudahan dalam mendirikan bank dan kantor-kantor cabang. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 1991-1992, yaitu sebesar 24%, faktor penyebabnya adalah pada waktu itu pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat, sehingga tingkat suku bunga tinggi dan ini menyebabkan masyarakat banyak yang menyimpan dananya ke bank. Sejak tahun 1994 sampai tahun 1997 peningkatan jumlah dana yang terhimpun sangat besar, hal ini disebabkan salah satunya adalah meningkatnya jumlah kantor bank, yang mana pada tahun 1994 terdapat 1.171 buah jumlah kantor cabang bank pemerintah. Jumlah ini terus mengalami peningkatan, sampai akhirnya pada tahun 1997 sebanyak 1.476 gedung untuk kantor cabang telah didirikan oleh bank pemerintah

Tabel 3. Hubungan Antara Jumlah Kredit dengan Besar Dana Pada Bank Umum Milik Negara Periode Tahun 1990-1997

Tahun	Kredit (Y)	Dana (X1)
1990	48.514	35.547
1991	57.084	38.365
1992	64.872	47.669
1993	70.297	58.474
1994	76.291	61.588
1995	88.167	68.573
1996	102.246	83.529
1997	112.251	95.563

Sumber : Lampiran 1b



Pada tabel 3 menunjukkan bahwa semakin meningkat dana yang terhimpun maka jumlah kredit yang disalurkan juga semakin besar. Deregulasi 1 Juni 1983, di mana salah satunya berisi pembebasan besar plafon untuk penyaluran kredit ikut mempengaruhi meningkatnya kredit dengan tajam. Peningkatan kredit yang paling tinggi terjadi pada tahun 1990-1991 yaitu sekitar 18%. Kebijakan uang ketat membuat masyarakat banyak mengalihkan dananya pada bank dan kondisi investasi menurun sehingga jumlah kredit yang disalurkan hanya meningkat sebesar 8%.

Tabel 4. Hubungan Antara Jumlah Kredit dengan Tingkat Suku Bunga SBI Pada Bank Umum Milik Negara Tahun 1990-1997

Tahun	Kredit (Y)	SBI (X2)
1990	48.514	15,71
1991	57.084	19,14
1992	64.872	15,62
1993	70.297	11,58
1994	76.291	10,44
1995	88.167	14,08
1996	102.246	12,95
1997	112.251	16,22

Sumber : Lampiran 1b

Hubungan antara tingkat suku bunga SBI dengan besarnya kredit yang disalurkan seyogyanya mempunyai hubungan yang negatif, hal ini karena sifat dari SBI adalah kontraktif artinya menurunkan jumlah uang beredar dengan meningkatkan suku bunga kredit dan simpanan. Tabel 4 memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan cenderung terus meningkat walaupun suku bunga SBI dinaikkan. Kenaikan terbesar dari suku bunga SBI terjadi antara tahun 1990-1991, yaitu sebesar 22%. Ketika pemerintah menjatuhkan pilihan untuk memberlakukan kebijakan uang ketat (TMP) pada tahun 1990-1992 terdapat suatu fenomena di sektor moneter yang menyimpang dari logika ekonomi, yaitu tidak segera diresponnya kebijakan tersebut

dengan menurunnya gairah berinvestasi di sektor riil. Hal ini benar-benar mengejutkan dan diluar teori ekonomi. Logikanya, tingginya suku bunga pasti akan diikuti dengan mengendurnya gairah berinvestasi. Jika kemudian dalil ini disalahi, maka yang terjadi kemudian adalah perekonomian makro menjadi overheated, yang ditandai dengan munculnya kasus-kasus kredit macet di belakangnya. Dengan demikian, akhirnya terbukti juga, bahwa dalil lama tetap berlaku. Walaupun ada penyimpangan terhadap aturan semacam itu, maka buntutnya adalah munculnya sejumlah ekses, yang sudah dirasakan sebelumnya (Prasetiantono, 1995:55).

Tabel 5. Hubungan Antara Jumlah Kredit dengan Tingkat Suku Bunga SBPU Pada Bank Umum Milik Negara Tahun 1990-1997

Tahun	Kredit (Y)	SBPU (X3)
1990	48.514	18,32
1991	57.084	21,18
1992	64.872	16,71
1993	70.297	12,11
1994	76.291	13,86
1995	88.167	15,75
1996	102.246	15,64
1997	112.251	15,51

Sumber : Lampiran 1b

SBPU mempunyai sifat yang ekspansif yaitu menambah jumlah uang yang beredar, jika suku bunga SBPU dinaikkan maka jumlah uang beredar juga meningkat. Pada tabel 5 telah ditunjukkan bahwa semakin besar tingkat suku bunga SBPU maka jumlah kredit yang disalurkan juga semakin besar. Antara tahun 1992-1993 tingkat suku bunga menurun dengan tajam yaitu sebesar 27%, dari 16,71% menjadi 12,11. Sedangkan kredit yang disalurkan naik sebesar 5.425 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 8%, Hal ini disebabkan tingkat suku bunga SBI juga menurun sebesar 26%.

#### 4.2 Analisis Impresial

Analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel dana yang dihimpun, tingkat suku bunga SBI dan tingkat suku SBPU terhadap variabel jumlah kredit adalah analisa regresi non linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan analisa regresi seperti yang ditunjukkan pada lembar lampiran, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{LogY} = -0,76 + 0,83 \text{ LogX}_1 - 0,12 \text{ LogX}_2 + 0,26 \text{ LogX}_3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta  $\beta_0 = -0,76$  menunjukkan bahwa tanpa adanya dana yang dihimpun ( $X_1$ ), tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) dan tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ), maka jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara adalah negatif artinya tidak mungkin tercipta penyaluran kredit pada bank umum milik negara. Dengan demikian variabel jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ), tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) dan tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.
2. Variabel jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ) mempunyai koefisien regresi 0,83. Hal ini berarti bila tidak ada perubahan tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) dan tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) maka setiap kenaikan jumlah dana yang terhimpun sebesar satu milyar akan menyebabkan kenaikan penyaluran kredit bank umum milik negara sebesar 0,83 milyar. Jadi jumlah dana yang terhimpun mempunyai pengaruh secara positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.
3. Variabel tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) mempunyai koefisien regresi  $-0,12$ . Hal ini berarti, bila tidak ada perubahan pada variabel dana yang terhimpun ( $X_1$ ) dan

tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) maka setiap kenaikan tingkat bunga SBI sebesar satu persen akan menyebabkan penurunan jumlah kredit yang disalurkan sebesar 0,12 milyar. Jadi tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara negatif terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.

4. Variabel tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) mempunyai koefisien regresi 0,26. Hal ini berarti bila tidak ada perubahan pada variabel jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ) dan tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) maka setiap kenaikan tingkat suku bunga SBPU sebesar satu persen akan menyebabkan kenaikan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara sebesar 0,26 milyar. Jadi tingkat suku bunga SBPU berpengaruh secara positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.

#### 4.1.1 Uji secara statistik

##### (1) Pengujian secara serentak ( F-test )

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil pengujian secara serentak (lihat tabel 1) menunjukkan bahwa F ratio hasil perhitungan = 182,903. Sedangkan F tabel dengan tingkat keyakinan 90% atau  $F(k-1, N-k-1, 0,10) = 2,96$ . Berarti variabel bebas (jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ), tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) dan tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ )) secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara (Y)), karena F hitung > F tabel atau  $182,903 > 2,96$

Tabel 6 : Analisa regresi untuk pengujian secara bersama-sama

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat tengah	F hitung	F tabel
Regresi	3	0,43	0,14	182,903	2,96
Kesalahan	28	0,02	7.848		
Total	31	0,45			

Sumber : Lampiran 3

(2) Uji koefisien regresi secara parsial (t-test)

Pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menggunakan uji T dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing koefisien regresi variabel bebas dana yang terhimpun ( $X_1$ ), tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) dan tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat jumlah kredit yang disalurkan ( $Y$ ).

Pengujian dapat dilakukan pada masing-masing variabel bebas sebagai berikut :

Tabel 3 : Analisa regresi untuk pengujian secara parsial

Variabel Bebas	Koefisien Bebas	Koefisien Partial	Standart. Error koefisien regresi	T hitung	T tabel
X1	0,83	0,9437	3,808	21,663	1,701
X2	-0,12	0,0734	7,845	-1,889	1,701
X3	0,26	0,1688	0,11	2,385	1,701

Sumber : Lampiran 3

1. Uji signifikansi dua sisi ( $\alpha=0,10$ ) pada variabel jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ) terhadap jumlah kredit yang disalurkan ( $Y$ )

Ketentuannya :

$H_0 : \beta_1 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh dari variabel jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ) terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan ( $Y$ )

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ , berarti ada pengaruh antara variabel jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ ) terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan ( $Y$ ).

Sesuai pada lampiran :

t-hitung untuk  $\beta_1 = 21,663$

t-tabel ( $0,05 ; 28$ ) = 1,701

Berdasarkan hasil tersebut di atas, dengan tingkat keyakinan 90% ;  $\alpha/2=0,05$ , ternyata :  $-t \alpha/2 \geq t\text{-hitung} \geq t \alpha/2$ , dalam hal ini  $-1,701 \geq -21,663$  dan  $21,663 \geq 1,701$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan kata lain hipotesis diterima. Dengan demikian berarti jumlah dana yang terhimpun ( $X_1$ )

mempunyai pengaruh secara nyata (signifikan) terhadap jumlah kredit yang disalurkan (Y) oleh bank umum milik negara.

2. Uji signifikan dua sisi ( $\alpha=10\%$ ) pada variabel tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan (Y).

Ketentuannya :

$H_0 : \beta_2 = 0$  ; berarti tidak ada pengaruh dari variabel bebas tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) terhadap variabel terikatnya yaitu jumlah kredit yang disalurkan (Y).

$H_1 : \beta_2 \neq 0$  ; berarti ada pengaruh dari variabel bebas tingkat suku bunga SBI ( $X_1$ ) terhadap variabel terikatnya yaitu jumlah kredit yang disalurkan (Y).

Sesuai dengan hasil perhitungan :

t-hitung untuk  $\beta_2 = -1,889$

t-tabel (0,05 ; 28) = 1,701

Berdasarkan hasil tersebut di atas, dengan tingkat keyakinan 90% ;  $\alpha/2=0,05$ , ternyata :  $-t \alpha/2 \geq t\text{-hitung} \geq t \alpha/2$ , dalam hal ini  $-1,701 \geq -1,889$  dan  $1,889 \geq 1,701$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan kata lain hipotesis diterima. Dengan demikian berarti tingkat suku bunga SBI ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh secara nyata (signifikan) terhadap jumlah kredit yang disalurkan (Y) oleh bank umum milik negara.

3. Uji signifikansi dua sisi ( $\alpha=0,10$ ) pada variabel bebas tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) terhadap jumlah kredit yang disalurkan (Y)

Ketentuannya :

$H_0 : \beta_3 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh dari variabel tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan (Y)

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ , berarti ada pengaruh antara variabel tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan (Y).

Sesuai pada lampiran :

t-hitung untuk  $\beta_3 = 2,385$

t-tabel (0,05 ; 28 ) = 1,701

Berdasarkan hasil tersebut di atas, dengan tingkat keyakinan 90% ;  $\alpha/2=0,05$ , ternyata :  $-t \alpha/2 \geq t\text{-hitung} \geq t \alpha/2$ , dalam hal ini  $-1,701 \geq -2,385$  dan  $2,385 \geq 1,701$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan kata lain hipotesis diterima. Dengan demikian berarti tingkat suku bunga SBPU ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh secara nyata (signifikan) terhadap jumlah kredit yang disalurkan ( $Y$ ) oleh bank umum milik negara.

#### 4.1.2 Uji Ekonometrik

##### (1) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan yang sempurna antara variabel bebas dalam model regresi. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas diantaranya adalah kalau dari hasil regresi  $R^2$  cukup tinggi, tetapi tidak satupun dari koefisien regresi yang signifikan, maka dalam hal ini terdapat masalah multikolinearity (Gujarati, 1991:166). Hasil pengujian multikolinearitas sebagai berikut :

Koefisien  $b_1 = 0,83$

Koefisien  $b_2 = -0,12$

Koefisien  $b_3 = 0,26$

Determinasi = 0,95

Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa  $R^2 = 0,95$  dan keseluruhan koefisien regresi menunjukkan angka yang signifikan, yaitu : jumlah dana yang terhimpun ( $b_1$ ) = 0,83; tingkat suku bunga ( $b_2$ ) = -0,12; dan tingkat suku bunga SBPU ( $b_3$ ) = 0,26; maka model regresi yang digunakan pada analisis ini tidak mengandung atau bebas dari multikolinearitas.

##### (2) Uji Autokorelasi

## (2) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam persamaan regresi, digunakan uji DW (Durbin Watson), yaitu membandingkan nilai DW yang dihitung dengan nilai DL dan DU dalam tabel. Hasil analisis pengujian autokorelasi sebagai berikut :

$$10\% : \quad DL = 1,04$$

$$10\% : \quad DU = 1,43$$

$$\text{Durbin Watson} = 1,4128$$

Nilai DW dari hasil perhitungan = 1,4128; sedangkan nilai DW tabel (10% : DL = 1,04; DU = 1,43). Jadi nilai DW < DU, dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai DW tersebut menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi antara variabel-variabel bebas (dana yang terhimpun, tingkat suku bunga SBI dan tingkat suku bunga SBPU) dengan variabel pengganggu.

## (3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam analisis regresi untuk mendapatkan hasil yang baik, asumsi klasik lainnya yang harus dipenuhi adalah homogenitas varietas yang ditimbulkan oleh variabel pengganggu.

Untuk melihat apakah model persamaan regresi mengandung variabel pengganggu yang heteroskedastik atau tidak, maka diuji dengan menggunakan Spearman's Rank Correlation Test.

Hasil Uji Spearman's Rank Correlation sebagai berikut :

$$\text{Critical Value} = 0,34876$$

$$\text{Korelasi X1 \& e} = 0,97017$$

$$\text{Korelasi X2 \& e} = 0,37277$$

$$\text{Korelasi X3 \& e} = 0,36639$$

Karena korelasi X1 dan e (variabel pengganggu) > critical value atau  $0,97017 > 0,34876$ ; korelasi X2 dan e > critical value atau  $-0,37277 < -0,34876$ ;

korelasi  $X_3$  dan  $e > \text{critical value}$  atau  $-0,36639 < -0,34876$ ; maka dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

## 4.3 Pembahasan

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda serta setelah diuji dengan pengujian koefisien secara parsial dan serentak, memberikan gambaran bahwa ada pengaruh secara nyata (signifikan secara statistik) antara variabel bebas (dana yang terhimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU) dengan variabel terikat (jumlah kredit yang disalurkan), dari hal ini dapat diketahui bahwa deregulasi perbankan yang dikeluarkan sejak Juni 1983 telah mampu mendorong lembaga perbankan nasional untuk meningkatkan jumlah simpanan masyarakat yang berguna dalam pembiayaan pembangunan.

Deregulasi 1 Juni 1983 merupakan awal dari era liberalisasi sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perbankan. Tujuan tersebut dicapai melalui peningkatan persaingan antar bank yaitu dengan jalan penghapusan pagu kredit dan pengendalian suku bunga secara langsung oleh otoritas moneter kecuali dalam hal-hal khusus. Selain itu lembaga perbankan dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pendanaan, dalam arti ketergantungan atas dana-dana murah dari Bank Indonesia harus dikurangi. Dengan demikian lembaga-lembaga perbankan didorong untuk memobilisasi dana dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan perkreditannya. Peningkatan persaingan antar bank juga terus diupayakan dengan dikeluarkannya deregulasi lanjutan pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto) yaitu dengan membuka kesempatan bagi pendirian bank-bank baru atau pembukaan kantor cabang dari bank yang telah ada.

Berbagai deregulasi tersebut mengakibatkan persaingan antar lembaga keuangan semakin meningkat. Dalam persaingan di bidang mobilisasi dana masyarakat, masing-masing bank berusaha menanggung dana dari masyarakat sebanyak mungkin yaitu dengan cara menaikkan tingkat bunga simpanan melebihi

saingannya. Sementara itu persaingan dalam pemberian kredit, bank-bank berusaha untuk menekan tingkat bunga pinjaman. Cara bersaing seperti itu menjadikan tingkat bunga simpanan meningkat sedangkan tingkat bunga pinjaman semakin menurun, hal ini menyebabkan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat semakin meningkat dan diharapkan jumlah kredit juga semakin besar. Efek dari cara bersaing seperti diatas mengakibatkan spread antara keduanya mengecil sehingga menyebabkan penerimaan bank juga semakin mengecil.

Koefisien regresi  $X_1$  (jumlah dana yang terhimpun) = 0,83, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi  $X_1$ , bank umum milik negara mempunyai kecenderungan untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang semakin besar. Hubungan positif ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa penciptaan kredit dapat berlangsung jika ada kelebihan cadangan (excess reserve) pada bank umum (Iswardono, 1990:60). Jumlah  $X_1$  akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah cadangan dana pada bank umum. Semakin besar jumlah dana yang terhimpun akan semakin besar pula kelebihan cadangan, sehingga akan memperbesar kemampuan bank umum milik negara untuk menyalurkan kredit.

Meskipun paket deregulasi tersebut dapat membawa efek yang menguntungkan tetapi beberapa masalah dapat timbul, sehingga harus ditanggulangi agar tidak memberikan hasil yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah yang timbul akibat dari deregulasi 1983 dan 1988 adalah persaingan antar bank dapat menyebabkan meningkatnya suku bunga pinjaman yang didorong oleh meningkatnya suku bunga simpanan. Hal ini tidak saja mempengaruhi iklim investasi tetapi juga akan terjadi pergeseran dalam alokasi kredit dari sektor-sektor investasi ke sektor-sektor konsumtif dan spekulatif yang akhirnya tekanan-tekanan inflasi akan mulai terasa. Permasalahan ini hanya dapat diatasi apabila kebijakan moneter dapat berjalan dengan efektif.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian sejak adanya liberalisasi keuangan adalah melalui pengendalian kredit domestik secara tidak langsung dengan instrumennya yaitu SBI dan SBPU. Melalui

penjualan SBI dan SBPU, Bank Indonesia menyedot uang dari masyarakat. Penjualan SBI dan SBPU oleh BI ini akan mengurangi cadangan dari bank umum sehingga akhirnya kredit menjadi ketat. Sebaliknya, pembelian SBI dan SBPU oleh BI akan menyebabkan kredit pada umumnya longgar, karena cadangan pada bank umum lebih banyak.

Instrumen SBI dan SBPU dikatakan efektif apabila dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu mempunyai kemampuan sebagai pengendali kredit. Penggunaan instrumen SBI tampaknya dapat dikatakan efektif yaitu dengan adanya koefisien regresi yang mempunyai nilai sebesar  $-0,12$ . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat bunga berpengaruh secara negatif terhadap penyaluran kredit bank umum milik negara. Hasil analisa tersebut mempunyai arti bahwa setiap kenaikan tingkat bunga SBI sebesar 1% akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan sebesar 0,12 milyar. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nopirin (1990:56) yang menyebutkan bahwa tindakan otoritas moneter dengan menggunakan instrumen operasi pasar terbuka yaitu melalui penjualan dan pembelian surat-surat berharga akan berpengaruh terhadap jumlah cadangan bank-bank umum dan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan mempengaruhi penyaluran kredit oleh bank umum tersebut. Penjualan SBI yang dibarengi dengan menaikkan tingkat bunga SBI oleh otoritas moneter (BI) sehingga akan mendorong bank umum pemerintah untuk mengalokasikan danayna ke dalam bentuk surat berharga tersebut. Pembelian SBI ini akan mengurangi cadangan bank umum sehingga akibatnya kemampuan bank umum dalam penciptaan kredit menjadi berkurang.

Mekanisme lainnya dapat dijelaskan bahwa tingkat bunga SBI akan menimbulkan implikasi meningkatnya tingkat bunga di pasar uang karena sektor perbankan harus berkompetisi dengan BI dalam usaha menyerap dana dari masyarakat. Terjadinya kenaikan tingkat bunga umum ini akan memberi arti semakin mahalnya dana perbankan sehingga akan menyebabkan pihak perbankan

memperketat penyediaan kredit, sehingga jumlah kredit yang disalurkan menjadi berkurang.

Sementara itu penggunaan instrumen SBPU sebagai alat pengendalian kredit nampaknya tidak menunjukkan pengaruh seperti yang diharapkan. Koefisien regresi tingkat bunga SBPU mempunyai nilai sebesar 0,26. Hasil ini menunjukkan pengaruh tingkat suku bunga SBPU terhadap kredit tidak seperti yang diharapkan, seharusnya dengan kenaikan tingkat bunga SBPU akan mengurangi jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum pemerintah. Indikasi ini dapat dijelaskan dengan beberapa alternatif penyebab :

1. Tingkat suku bunga kredit kurang elastis terhadap perubahan tingkat suku bunga SBPU, sehingga tidak mempengaruhi tindakan alokasi dana bank dalam bentuk kredit. Kurang elastisnya suku bunga kredit terhadap perubahan suku bunga SBPU selain dipengaruhi adanya kredit bermasalah yang cukup besar juga menyangkut efisiensi pada masing-masing bank umum pemerintah tersebut, misalnya masih tingginya biaya-biaya overhead.
2. Permintaan akan kredit tidak terpengaruh oleh kenaikan suku bunga kredit. Keadaan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anton (1991:219) mengenai adanya fenomena adverse selection dan moral hazard. Fenomena adverse selection muncul apabila pada saat tingkat bunga pinjaman tinggi, hanya investor dengan proyek-proyek yang tinggi resikonya yang akan memanfaatkan pinjaman tersebut, sedangkan investor yang proyeknya cukup aman enggan untuk meminjam. Fenomena moral hazard muncul apabila dengan semakin tingginya tingkat bunga pinjaman, investor merasa lebih aman, karena sebagian resiko ditanggung oleh perbankan sehingga cenderung lebih ceroboh dalam menjalankan investasinya.
3. Adanya keterbatasan dari kekuatan otoritas moneter dalam menggunakan instrumen operasi pasar terbuka. Keterbatasan ini dikarenakan adanya kemungkinan bagi bank-bank komersial tidak lagi memperhatikan kestabilan rasio cadangan mereka.

Hasil tersebut di atas mempunyai implikasi bahwa otoritas moneter harus berusaha untuk membuat instrumen ini lebih menarik, karena efeknya otoritas moneter akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan agregat moneter. Otoritas moneter harus agak memaksa bank-bank milik pemerintah untuk menempatkan dana-dananya dalam bentuk SBPU untuk mengurangi keterbatasan bekerjanya operasi pasar terbuka.

Uraian pembahasan dari analisa data di atas dapat dibuktikan dengan melihat pada kondisi perekonomian di Indonesia. Di tengah kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini, berbagai permasalahan masih dihadapi perekonomian Indonesia. Sebagian permasalahan mungkin ditimbulkan oleh kemajuan ekonomi itu sendiri. Hal ini terlihat antara lain terlihat ketika perekonomian Indonesia memasuki tahun 1990. Dengan semakin membaiknya iklim usaha antara lain sebagai akibat berbagai langkah kebijakan yang ditempuh, perekonomian nasional menunjukkan aktivitas yang meningkat, hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 1989 dan 1990 perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju yang cukup tinggi, yakni di atas 7 persen.

Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat memunculkan permasalahan baru, berupa memanasnya suhu perekonomian. Terlalu cepatnya laju pertumbuhan permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan yang memadai di sisi penawaran, telah menimbulkan gangguan terhadap kestabilan harga dan neraca pembayaran. Laju inflasi yang pada tahun 1988 dapat dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah (5,47 persen) terus meningkat menjadi 5,97 persen pada tahun 1989, dan 9,97 persen pada 1990. Laju inflasi yang terlalu tinggi tidak saja cenderung memperlemah daya saing hasil produksi Indonesia, tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap nilai Rupiah maupun kestabilan ekonomi makro.

Berbagai langkah telah ditempuh secara terpadu untuk memulihkan keseimbangan perekonomian makro. Sejak pertengahan tahun 1990, kebijakan moneter yang lebih ketat diterapkan, salah satunya adalah kebijakan uang ketat (TMP), yang mana otoritas moneter menaikkan tingkat bunga SBI dari 12,36 persen

pada triwulan pertama terus mengalami kenaikan sampai 19,18 persen pada triwulan ke empat. Kebijakan uang ketat diberlakukan sampai dengan tahun 1992.

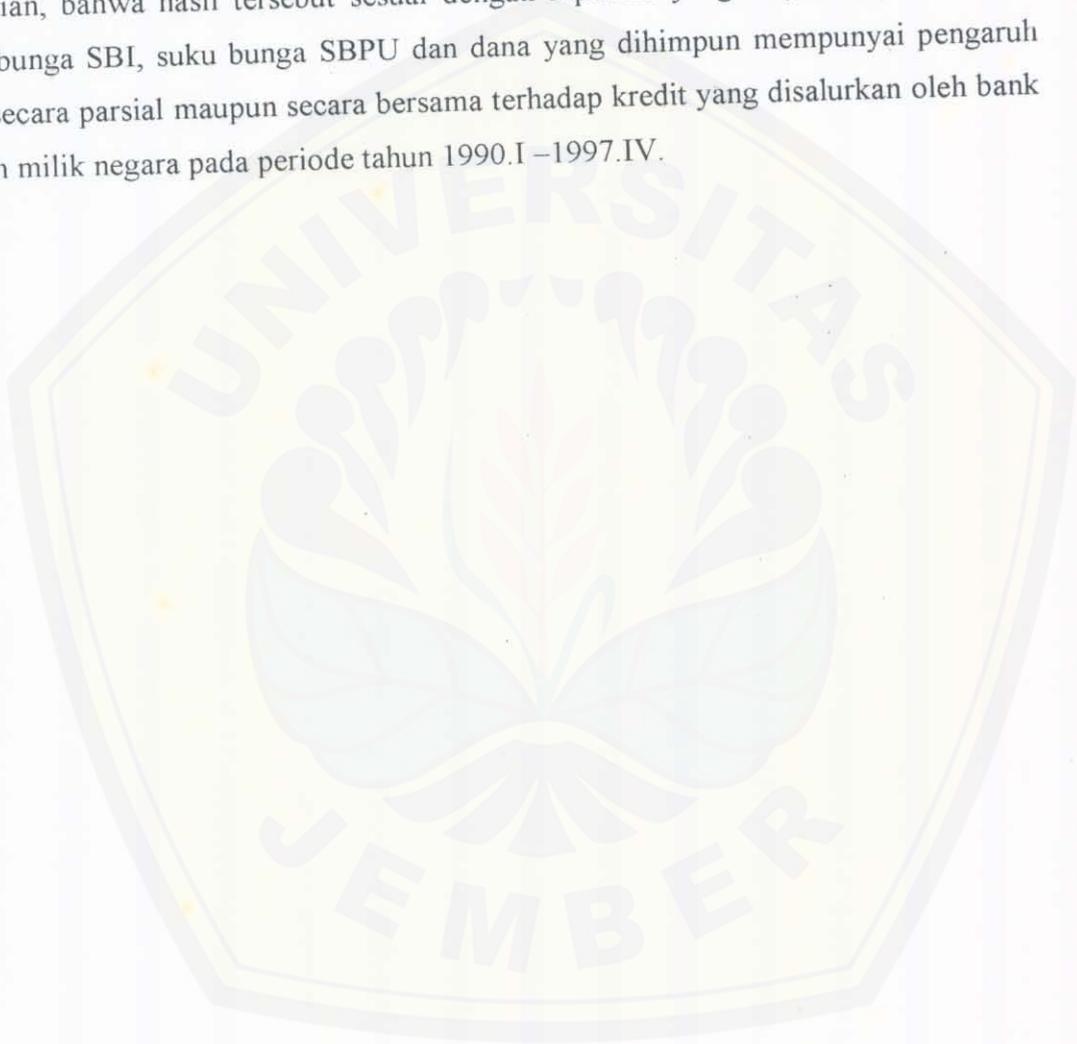
Ketika pemerintah menjatuhkan pilihan untuk memberlakukan kebijakan uang ketat (TMP) pada tahun 1990-1992 terdapat suatu fenomena di sektor moneter yang menyimpang dari logika ekonomi, yaitu tidak segera diresponnya kebijakan tersebut dengan menurunnya gairah berinvestasi di sektor riil. Hal ini benar-benar mengejutkan dan diluar teori ekonomi. Logikanya, tingginya suku bunga pasti akan diikuti dengan mengendurnya gairah berinvestasi. Jika kemudian dalil ini disalahi, maka yang terjadi kemudian adalah perekonomian makro menjadi overheated, yang ditandai dengan munculnya kasus-kasus kredit macet di belakangnya. Dengan demikian, akhirnya terbukti juga, bahwa dalil lama tetap berlaku. Kalaupun ada penyimpangan terhadap aturan semacam itu, maka buntutnya adalah munculnya sejumlah ekses, yang sudah dirasakan sebelumnya (Prasetiantono, 1995:55).

Upaya memulihkan suhu perekonomian dengan menggunakan kebijakan uang ketat tampak menunjukkan hasilnya secara berarti pada tahun 1993. Stabilitas perekonomian makro yang mantap pada tahun 1992, yang ditunjang pula oleh menurunnya tingkat bunga internasional, memberi peluang bagi otoritas moneter pada tahun 1993 untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pemulihan kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui dorongan penurunan suku bunga (suku bunga SBI pada triwulan II sebesar 11,80 persen) dan penyempurnaan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian yang mendorong peningkatan kredit perbankan. Sebagai hasilnya, sejak pertengahan 1993 perekonomian Indonesia menunjukkan kebangkitan kembali. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 7,25 persen pada tahun 1993, yang terutama didukung oleh menguatnya permintaan dalam negeri, baik untuk konsumsi maupun investasi.

Pada tahun 1993 suku bunga secara umum menurun secara tajam, misalnya suku bunga SBI yang pada masa diberlakukannya kebijakan uang ketat berkisar antara 18%-20% turun menjadi sekitar 9% sampai 10%. Hal ini membuat kegairahan kembali dalam berinvestasi, sehingga permintaan kredit pun bertambah besar

jumlahnya. Kejadian tersebut berlangsung sampai pada pertengahan tahun 1997, yang mana suku bunga SBI naik kembali sampai sekitar 20%, sehingga permintaan kredit menjadi menurun

Hasil analisa data dan uraian pembahasan diatas telah dapat memberikan penilaian, bahwa hasil tersebut sesuai dengan hipotesa yang diajukan yaitu bahwa suku bunga SBI, suku bunga SBPU dan dana yang dihimpun mempunyai pengaruh baik secara parsial maupun secara bersama terhadap kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara pada periode tahun 1990.I – 1997.IV.



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara dipengaruhi oleh variabel-variabel jumlah dana yang terhimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU, selain itu pula dipengaruhi oleh berbagai kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut, yaitu :

1. hasil regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel dana yang terhimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum pemerintah diperoleh persamaan :

$$\text{LogY} = -0,76 + 0,83 \text{ LogX}_1 - 0,12 \text{ LogX}_2 + 0,26 \text{ LogX}_3$$

Nilai konstanta sebesar  $-0,76$  menunjukkan bahwa tanpa adanya dana yang dihimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU tidak mungkin tercipta kredit pada bank umum milik negara

2. jumlah dana yang dihimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara nyata (signifikan) terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara
3. variabel jumlah dana yang dihimpun mempunyai pengaruh secara nyata terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara sebesar  $0,83$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah dana yang dihimpun sebesar satu milyar akan menyebabkan kenaikan penyaluran kredit sebesar  $0,83$  milyar
4. variabel tingkat suku bunga SBI mempunyai koefisien regresi  $-0,12$ . Hal ini menunjukkan bahwa bila tidak ada perubahan pada variabel bebas yang lain, maka setiap kenaikan tingkat bunga SBI sebesar satu persen akan menyebabkan berkurangnya jumlah kredit yang disalurkan sebesar  $0,12$  milyar

5. variabel tingkat suku bunga SBPU mempunyai pengaruh secara nyata terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah dana yang dihimpun sebesar satu milyar akan menyebabkan kenaikan penyaluran kredit sebesar 0,26 milyar.

### 5.3 Saran

Berdasarkan dari simpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, yaitu :

1. peningkatan penyaluran kredit haruslah disertai pemerataan dan ketepatan dalam pengalokasiannya sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu tetap diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan tanpa mengurangi efisiensi sistem perbankan yang telah ada
2. kemantapan efektivitas dari SBPU sebagai piranti pasar uang perlu dikaji ulang sehingga fungsi dari instrumen ini dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, yaitu sebagai pengendali kredit.

DAFTAR PUSTAKA

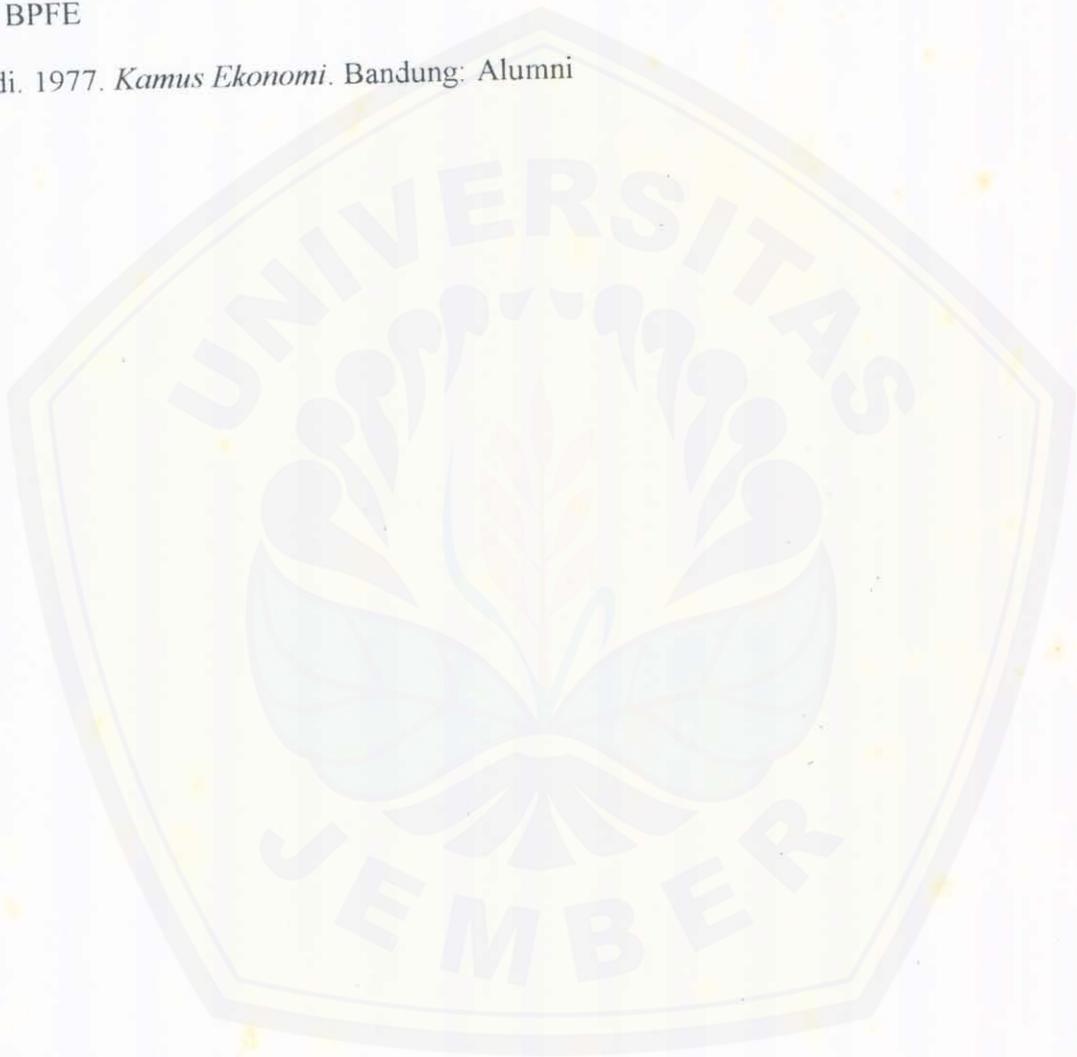
- Bank Indonesia. 1992. *Statistika Ekonomi – Keuangan Indonesia Tahun 1984, 1988, 1992, 1996, 1998*. Jakarta.
- Boediono. 1983. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE
- Djarwanto, Ps. 1982. *Pengantar Statistik*. Yogyakarta: BPFE
- Dornbusch, R dan S. Fischer. 1990. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, D. 1991. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Gunawan, A.H. 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Iswardono, S.P. 1993. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE
- Kelana, R. 1997. "Analisis Pengaruh Dana yang Dihimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional tahun 1986-1996". Dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Manulang. 1985. *Pengantar Teori Ekonomi Moneter*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marpaung, L. 1993. *Kejahatan terhadap Perbankan*. Jakarta: Erlangga
- Nopirin. 1993. *Ekonomi Moneter Jilid I*. Yogyakarta: BPFE
- Prasetiantono, A.T. 1995. *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siamat, D. 1993. *Manajemen bank umum*. Jakarta: Intermedia
- Sofyanhadi, M. 1994. "Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Milik Negara tahun 1988-1992". Dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Soetopo, P dan C. Harinowo. 1993. "Kebijaksanaan Moneter di Indonesia". Dalam Jurnal Ekonomi dan Industri. (November, 1). Edisi I Jakarta
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI

Soelistyo. 1982. *Ekonometrika Dasar*. Yogyakarta: BPFE

Wijaya, F. 1991. *Perkreditan dan Bank dan Lembaga Keuangan Kita*. Yogyakarta: BPFE

Wijaya, F dan S. Hadiwigeno. 1992. *Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Yogyakarta: BPFE

Winardi. 1977. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Alumni



Lampiran 1a : Perkembangan Jumlah Kredit , Dana yang Terhimpun, Suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU pada Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I - 1997.IV.

Tahun	Triwulan	Kredit yang Disalurkan (Y)	Dana yang Dihimpun (X1)	Suku Bunga SBI (X2)	Suku Bunga SBPU (X3)
1990	I	42.589	30.373	12,36	13,90
	II	46.915	33.594	14,27	18,81
	III	51.028	37.581	17,00	19,33
	IV	53.524	40.638	19,18	21,24
1991	I	54.699	34.059	20,66	24,83
	II	57.036	37.343	19,06	20,30
	III	56.739	40.244	18,65	19,83
	IV	59.861	41.813	18,20	19,76
1992	I	61.751	42.448	18,18	19,50
	II	63.357	46.030	16,00	17,33
	III	66.145	49.598	14,56	15,67
	IV	68.236	52.600	13,75	14,33
1993	I	69.066	54.260	12,50	13,50
	II	69.217	55.098	11,80	11,73
	III	71.143	62.853	10,90	11,22
	IV	71.760	61.683	11,10	12,00
1994	I	73.443	59.356	8,62	11,67
	II	74.274	60.604	10,48	13,63
	III	77.436	62.107	10,76	14,88
	IV	80.010	64.283	11,91	15,25
1995	I	81.333	63.513	14,15	15,75
	II	86.422	65.775	14,74	15,75
	III	91.431	69.339	14,02	15,75
	IV	93.480	75.663	13,99	15,75
1996	I	95.619	76.781	13,43	15,75
	II	100.379	82.129	13,26	15,75
	III	104.059	84.775	12,80	15,75
	IV	108.925	90.434	12,30	15,30
1997	I	110.900	83.602	12,16	15,75
	II	117.057	91.810	10,72	15,75
	III	110.500	102.991	22,00	15,75
	IV	110.550	103.850	20,00	14,75

Sumber : Statistika Ekonomi dan keuangan Indonesia

Lampiran 1b : Perkembangan Rata-Rata Jumlah Kredit , Dana yang Terhimpun suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU pada Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I - 1997.IV.

Tahun	Jumlah Rata-Rata			
	Kredit yang Disalurkan (Y)	Dana yang Dihimpun (X1)	Suku Bunga SBI (X2)	Suku Bunga SBPU (X3)
1990	48.514	35.547	15,71	18,32
1991	57.084	38.365	19,14	21,18
1992	64.872	47.669	15,62	16,71
1993	70.297	58.474	11,58	12,11
1994	76.291	61.588	10,44	13,86
1995	88.167	68.573	14,08	15,75
1996	102.246	83.529	12,95	15,64
1997	112.251	95.563	16,22	15,51

Sumber : Lampiran 1a

Lampiran 1c : Perubahan Rata-Rata Jumlah Kredit , Dana yang Terhimpun Suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU pada Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I - 1997.IV.

Tahun	Perubahan Rata-Rata			
	Kredit yang Disalurkan (Y)	Dana yang Dihimpun (X1)	Suku Bunga SBI (X2)	Suku Bunga SBPU (X3)
1990-1991	8.570	2.818	3,43	2,86
1991-1992	7.788	9.304	-3,52	-4,47
1992-1993	5.425	10.805	-4,04	-4,6
1993-1994	5.994	3.114	-1,14	1,75
1994-1995	11.876	6.985	3,64	1,89
1995-1996	14.079	14.956	-1,13	-0,11
1996-1997	10.005	12.034	3,27	-0,13

Sumber : Lampiran 1b

Lampiran 1d : Prosentase Rata-Rata Jumlah Kredit , Dana yang Terhimpun Suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU pada Bank Umur Milik Negara Tahun 1990.I - 1997.IV.

Tahun	Prosentase Rata-Rata			
	Kredit yang Disalurkan (Y)	Dana yang Dihimpun (X1)	Suku Bunga SBI (X2)	Suku Bunga SBPU (X3)
1990-1991	18%	8%	22%	16%
1991-1992	14%	24%	-18%	-21%
1992-1993	8%	23%	-26%	-27%
1993-1994	8%	5%	-10%	14%
1994-1995	16%	11%	35%	14%
1995-1996	16%	22%	-8%	-0,6%
1996-1997	10%	14%	25%	-0,6%

Sumber : lampiran 1b

Lampiran 2 : Transformasi Data Perkembangan Jumlah Kredit, Dana yang Terhimpun, Suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU pada Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I - 1997.IV.

Tahun	Triwulan	Log (Y)	Log (X1)	Log (X2)	Log (X3)
1990	I	4,63	4,48	1,09	1,14
	II	4,67	4,53	1,15	1,27
	III	4,71	4,57	1,23	1,29
	IV	4,73	4,61	1,28	1,33
1991	I	4,70	4,53	1,32	1,39
	II	4,76	4,57	1,28	1,31
	III	4,75	4,60	1,27	1,30
	IV	4,78	4,62	1,26	1,30
1992	I	4,75	4,63	1,26	1,29
	II	4,80	4,66	1,20	1,24
	III	4,82	4,70	1,16	1,20
	IV	4,83	4,72	1,14	1,16
1993	I	4,84	4,70	1,10	1,13
	II	4,84	4,74	1,07	1,07
	III	4,85	4,80	1,04	1,05
	IV	4,86	4,79	1,05	1,08
1994	I	4,87	4,77	0,94	1,07
	II	4,87	4,78	1,02	1,13
	III	4,89	4,79	1,03	1,17
	IV	4,80	4,81	1,08	1,18
1995	I	4,91	4,80	1,15	1,20
	II	4,92	4,82	1,17	1,20
	III	4,96	4,84	1,15	1,20
	IV	4,97	4,88	1,15	1,20
1996	I	4,98	4,89	1,13	1,20
	II	5,00	4,91	1,12	1,20
	III	5,02	4,93	1,11	1,20
	IV	5,04	4,96	1,09	1,18
1997	I	5,04	4,92	1,08	1,20
	II	5,05	4,96	1,03	1,20
	III	5,03	5,01	1,34	1,20
	IV	5,03	5,02	1,30	1,17

Lampiran 3 : Analisis regresi pengaruh jumlah dana yang terhimpun, suku bunga SBI dan suku bunga SBPU terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum Milik Negara pada tahun 1990.I – 1997.IV.

-----REGRESSION ANALYSIS-----

HEADER DATA FOR: C:SKRIPSI LABEL: FAKTOR2 YG MEMP. BESARNYA KREDIT BUMN  
 NUMBER OF CASES: 32 NUMBER OF VARIABLES: 4

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	LOG(X1)	.76	.15
2	LOG(X2)	1.15	.10
3	LOG(X3)	4.76	.940E-02
DEP. VAR.:	LOG(Y)	4.76	.12

DEPENDENT VARIABLE: LOG(Y)

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD.ERROR	T(DF= 28)	PROB.	PARTIAL r <sup>2</sup>
LOG(X1)	.83	3.808E-02	21.663	.00000	.9437
LOG(X2)	-.12	7.845E-02	-1.889	.14759	.0734
LOG(X3)	.26	.11	2.385	.02411	.1688
CONSTANT	-.76				

STD. ERROR OF EST. = .03

ADJUSTED R SQUARED = .95  
 R SQUARED = .95  
 MULTIPLE R = .98

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	.43	3	.14	182.903	.000E+00
RESIDUAL	2.197E-02	28	7.848E-04		
TOTAL	.45	31			

Lampiran 4 : Analisis Matrik Korelasi Pengaruh Dana yang Dihimpun, Suku Bunga SBI dan Suku Bunga SBPU Terhadap Kredit yang Disalurkan Oleh Bank Umum Milik Negara pada Tahun 1990.I – 1997.IV.

-----CORRELATION MATRIX-----

HEADER DATA FOR: C:MATRIX LABEL: FAKTOR2 YG MEMP.BESARNYA KREDIT BUMN  
 NUMBER OF CASES : 32 NUMBER OF VARIABLES: 4

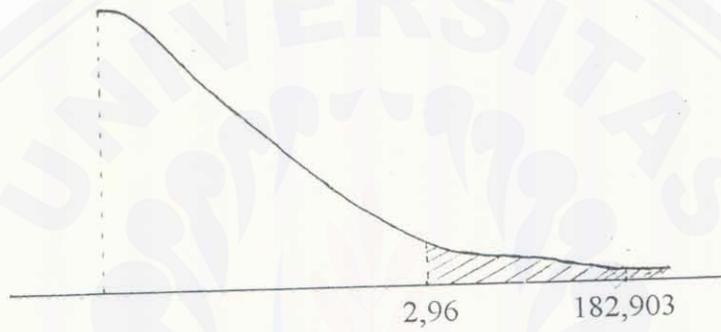
Rank Spearman's Correlation Matrix

	E	X1	X2	X3
e	1.00000			
X1	.97017	1.00000		
X2	-.37277	-.26889	1.00000	
X3	-.36639	-.45106	.76579	1.00000

CRITICAL VALUE (1-TAIL, .05) = + OR - .29635  
 CRITICAL VALUE (2-TAIL, .05) = +/- .34876

N = 32

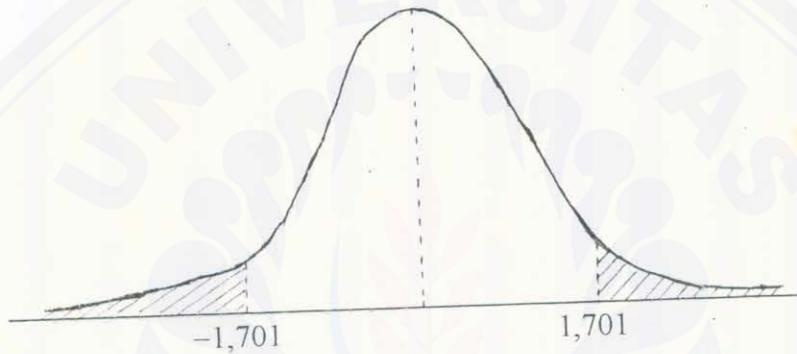
Lampiran 5 : Kriteria Pengujian Signifikansi F Test dengan Menggunakan Tingkat Keyakinan 90% untuk Variabel Dana yang Dihimpun, Variabel Suku Bunga SBI dan Variabel Suku Bunga SBPU Terhadap Variabel Jumlah Kredit yang Disalurkan Oleh Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I – 1997.IV.



F-tabel = 2,96

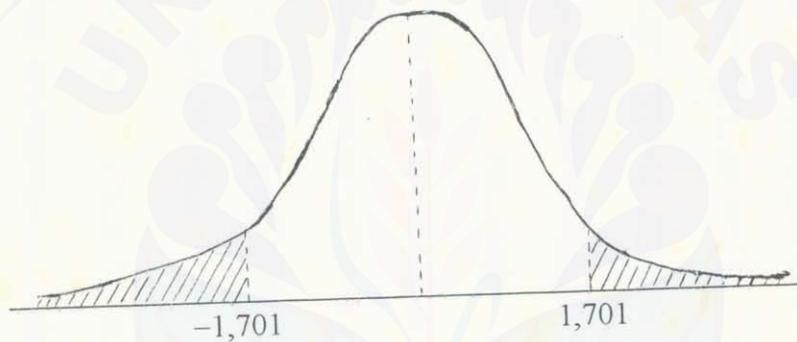
F-hitung = 182,903

Lampiran 6 : Kriteria Pengujian Signifikansi Dua Arah Keberartian T Test dengan Menggunakan Tingkat Keyakinan 90% untuk Variabel Dana yang Dihimpun Terhadap Variabel Jumlah Kredit yang Disalurkan Oleh Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I – 1997.IV.



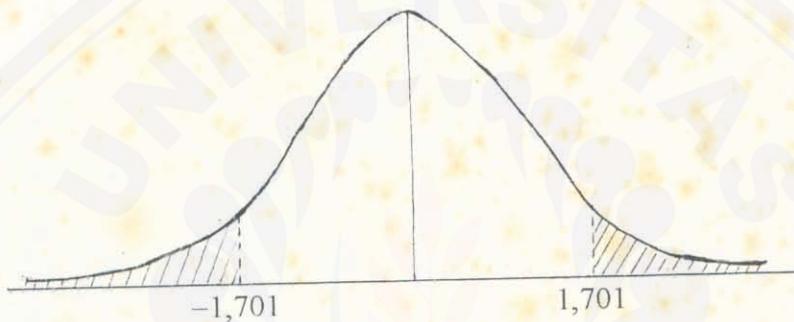
$T_{hit} = 21,663$  terletak di daerah kritis, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti jumlah dana yang terhimpun mempunyai pengaruh nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.

Lampiran 7 : Kriteria Pengujian Signifikansi Dua Arah Keberartian T Test dengan Menggunakan Tingkat Keyakinan 90% untuk Variabel Suku Bunga SBI Terhadap Variabel Jumlah Kredit yang Disalurkan Oleh Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I – 1997.IV.



$T_{hit} = -1,889$  terletak di daerah kritis, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti besarnya tingkat suku bunga SBI mempunyai pengaruh nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.

Lampiran 8 : Kriteria Pengujian Signifikansi Dua Arah Keberartian T Test dengan Menggunakan Tingkat Keyakinan 90% untuk Variabel Suku Bunga SBPU Terhadap Variabel Jumlah Kredit yang Disalurkan Oleh Bank Umum Milik Negara Tahun 1990.I – 1997.IV.



$T_{hit} = 2,385$  terletak di daerah kritis, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti besarnya tingkat suku bunga SBPU mempunyai pengaruh nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum milik negara.

